



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS KOPERASI UKM
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**



RENCANA KERJA 2025



Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila
Kab. Bone Bolango - Gorontalo



www.diskumperindag.gorontaloprov.go.id





PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jln. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango. Provinsi Gorontalo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 800/DKUPP/ 68 / I / 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, perlu disusun Rencana Kerja OPD sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;

b. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 mengamanatkan Pemerintah Daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023-2026;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, Penyusunan Renja-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif;

d. bahwa Rencana Kerja dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan ;
11. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Gubernur Gorontalo No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo;
16. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025, dengan susunan tim seluruhnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas:

1. Melakukan inventarisasi, identifikasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengolahan data dan informasi, menelaah dan menganalisis, penyelarasan dan penajaman, serta mengevaluasi bahan/materi perihal yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja);
2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sesuai tahapan dan tata cara dokumen rencana perangkat daerah berdasarkan kebijakan dan regulasi yang berlaku;

3. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2025

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 2024

KEPALA DINAS



RISJON K. SUNGE
NIP. 196909241989021001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo (sebagai laporan)
4. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo
5. Inspektur Provinsi Gorontalo
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 800/DKUPP/SK/ 68 / 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

Pengarah/ Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Tim Penyusun :

Ketua : Sekretaris Dinas

Wakil Ketua :

1. Kepala Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Penembangan Koperasi Usaha Kecil
3. Kepala Bidang Perindustrian
4. Kepala Bidang Perdagangan
5. Kepala Balai UPTD BPSMB

Kelompok Kerja :

1. Kasubag Umum & Kepegawaian
2. Perencana Ahli Muda
3. Kepala Sub Bagian Keuangan
4. Pengawas Koperasi Ahli Muda
5. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
6. Pengawas Perdagangan Ahli Muda
7. Kasubag. Tata Usaha UTD BPSMB
8. Kasi. Jaminan Mutu
9. Kasi. Pelayanan Teknis
10. Pelaksana

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 2024

KEPALA DINAS



RISJON K. SUNGE

NIP. 196909241989021001



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 ini dapat diselesaikan

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025, RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 ini menjadi dasar penyusunan dengan tetap mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang disusun bersamaan dengan RPD, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. menyatakan bahwa tujuan daerah melaksanakan pembangunan adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing pemerintah daerah. Selanjutnya sesuai dengan pasal 260 UU 23 Tahun 2014 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat dengan RKPD.

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo melaksanakan 12 Program, 20 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan yaitu terdiri program/kegiatan di Bidang Koperasi, Bidang UKM, Bidang Industri, Bidang Perdagangan, UPTD BPSMB dan Kesekretariatan. Pelaksanaan program dan kegiatan akan sangat tergantung pada komitmen kerja dan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal yang dibangun yang berdasar pada peraturan yang berlaku.



Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025. Semoga pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 2025 berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Gorontalo, 29 Juli 2024

KEPALA DINAS

RISION SUNGE

Pembina Utama Madya

NIP. 196909241989021001



DAFTAR ISI

<i>Uraian</i>	<i>Hal</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistimatika Penulisan	8
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKnPD Tahun 2023 dan	9
Capaian Renstra SKPD	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kumperindag.....	80
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	84
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	90
Provinsi Gorontalo Tahun 2025	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	104
Bab III Tujuan Sasaran Perangkat Daerah	110
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	110
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	114
3.3. Program dan Kegiatan	116
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	129
Bab V Penutup	130

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Program & Kegiatan beserta realisasi Keuangan Tahun 2023	9
Tabel 2.2.	Indikator Sasaran Diskumperindag Prov. Gorontalo Tahun 2023	14
Tabel 2.3.	Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	16
Tabel 2.4.	Data Perkembangan Koperasi 2021-2023	17
Tabel 2.5.	Data Keragaan Koperasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2023	18
Tabel 2.6.	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai Kesehatannya Per 31 Desember 2023	20
Tabel 2.7.	Rekap Data UMKM Tahun 2021-2023 per Kabupaten/kota	29
Tabel 2.8.	Perkembangan IKM Tahun 2021 - 2023	31
T-C. 29.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	55
T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	85
T-C.31.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	94
T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025. Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	105
Tabel 3.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2023-2026	115
Tabel 3.2.	Perbandingan Jumlah Program Kegiatan dan Anggaran	118
Tabel 3.3.	Perbandingan Program Kegiatan dan Anggaran RKPD & Renja 2025	118
T-C. 33.	Rumusan Rencana Program SKPD Tahun 2025 dan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD 2026 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	119



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2025 ini merupakan penjabaran rencana strategis (renstra) tahun 2023-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan kondisi Provinsi Gorontalo dimana masa jabatan Kepala Daerah akan berakhir di tahun 2022, maka sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada Tahun 2022, bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026 dan kemudian menyusun Rencana kerja perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Sebagaimana Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, bahwa Renstra PD Tahun 2023-2026 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan awal ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan rencana



strategis (renstra) tahun 2023-2026 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Peraturan Gubernur ini menyebutkan bahwa Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Bidang Perdagangan yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur dan SK Gubernur Gorontalo Nomor 111/5/3/2023 tentang peta jabatan pada perangkat daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
- f. pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan



g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Kumperindag diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta dengan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Pada rancangan awal rencana kerja ini telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2023 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2024. Sebagai acuan Kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan program kegiatan pada rancangan awal Renja PD Tahun 2025 yaitu dengan memperhatikan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas daerah maupun program prioritas masing-masing perangkat daerah yang tertuang dalam rancangan RKPD tahun 2025 dan memperhatikan indikator sasaran utama, indikator program dan indikator kegiatan utama OPD. Rencana Kerja PD Tahun 2025 harus dapat menjawab permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi OPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Penyusunan Rancangan awal Renja PD dirumuskan mengacu pada Rancangan Awal RKPD tahun 2025, mempedomani Renstra PD 2023-2024, serta RPJPD Provinsi Gorontalo tahun 2007-2025. Rancangan Awal Renja PD juga mengacu pada permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, dan yang berasal dari usulan masyarakat.

Rancangan Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja OPD dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di OPD. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pemerintahan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 Disamping itu, penyusunan Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 juga memperhatikan dokumen perencanaan tahunan Kementerian/Lembaga dan SKPD Kabupaten/Kota, yang meliputi:

1. Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI 2020-2024;
2. Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020-2024; dan



3. Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020-2024; serta
4. Renja SKPD Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo

Periode Keempat dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu **Gorontalo Maju Dan Mandiri**. Visi ini pada dasarnya meletakkan kemajuan dan kemandirian daerah sebagai indikator kesuksesan pembangunan yang menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan (*quality-sustainable growth*).

Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai propinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244}
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
10. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1491);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah



25. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03).
27. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2023-2024.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi dasar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
2. Menjadi sarana untuk mengukur tingkat capaian sasaran program dan kegiatan SKPD dalam mendukung pencapaian sasaran RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Renstra Diskumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.
3. Menjadi alat koordinasi, sinkronisasi dan penyelarasan prioritas dan sasaran program dan kegiatan lintas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat serta pelaku usaha, masyarakat, organisasi profesi, LSM, perguruan tinggi, lembaga donor selaku pemangku kepentingan (stakeholder) di sektor koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Diskumperindag Provinsi Gorontalo yang tercantum dalam Renstra Diskumperindag periode 2023-2026.



1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kumperindag Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, dalam Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD, yang meliputi Sub Bab *Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan* serta *Sistematika Penulisan*.
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023, Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, yang dikaitkan dengan capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan beserta isu-isu yang melingkupi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, serta kajian terhadap rancangan awal RKPD dan telaah usulan program dan kegiatan masyarakat, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD, yang meliputi Sub Bab *Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD* serta *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*.
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, Bab ini diawali dengan kajian kebijakan nasional yang mempengaruhi pencapaian pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD, kajian terhadap isu-isu penting yang mendasari perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD, yang meliputi Sub Bab *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD* serta *Program dan Kegiatan*.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD
- BAB V PENUTUP, Bab ini menguraikan catatan-catatan penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Pada tahun 2023 Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo setelah refocusing anggaran melaksanakan 12 program, 20 kegiatan, 28 sub kegiatan dengan Realisasi Fisik 96,81 % dan Realisasi Keuangan 92,89%. Adapun program dan kegiatan beserta realisasi keuangan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 : Program dan Kegiatan beserta Realisasi Keuangan Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal	PAGU AKHIR	REALISASI		
			KEUANGAN	SISA	FISIK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29.716.135.532	53.980.687.812	50.144.137.080	3.836.550.732	96,81
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	23.245.680.313	34.049.094.241	33.603.813.080	445.281.161	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.975.723.713	14.040.115.641	13.666.150.434	373.965.207	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	930.536.400	930.536.400	930.071.112	465.288	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	520.283.400	460.522.900	460.217.152	305.748	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	410.253.000	470.013.500	469.853.960	159.540	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.641.919.913	9.593.170.693	9.300.609.621	292.561.072	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.525.980.913	9.477.231.693	9.184.737.481	292.494.212	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	115.939.000	115.939.000	115.872.140	66.860	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	377.474.000	377.474.000	377.166.100	307.900	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	377.474.000	377.474.000	377166100	307.900	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.540.897.000	1.358.409.100	1.354.542.233	3.866.867	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.540.897.000	1.358.409.100	1.354.542.233	3.866.867	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.484.896.400	1.780.525.448	1.703.761.368	76.764.080	100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.484.896.400	1.780.525.448	1.703.761.368	76.764.080	100
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	340.000.200	140.000.200	139.893.350	106.850	100



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal	PAGU AKHIR	REALISASI		
			KEUANGAN	SISA	FISIK
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	340.000.200	140.000.200	139.893.350	106.850	100
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	340.000.200	140.000.200	139.893.350	106.850	100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.494.733.400	1.494.733.400	1.476.095.636	18.637.764	100
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.494.733.400	1.494.733.400	1.476.095.636	18.637.764	100
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.494.733.400	1.494.733.400	1.476.095.636	18.637.764	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	351.394.900	511.954.900	511.775.050	179.850	100
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	351.394.900	511.954.900	511.775.050	179.850	100
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	351.394.900	511.954.900	511.775.050	179.850	100
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.464.807.200	1.858.867.200	1.847.359.972	11.507.228	100
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1.464.807.200	1.858.867.200	1.847.359.972	11.507.228	100
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	530.576.200	905.276.200	903.693.285	1.582.915	100
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	934.231.000	953.591.000	943.666.687	9.924.313	100
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	5.619.020.900	16.003.422.900	15.962.538.638	40.884.262	100



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal	PAGU AKHIR	REALISASI		
			KEUANGAN	SISA	FISIK
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	5.619.020.900	16.003.422.900	15.962.538.638	40.884.262	100
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5.619.020.900	16.003.422.900	15.962.538.638	40.884.262	100
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.865.228.814	16.431.164.166	13.065.666.097	3.365.498.069	95,43
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100.851.820	100.851.820	96.180.367	4.671.453	99,01
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	100.851.820	100.851.820	96.180.367	4.671.453	99,01
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	100.851.820	100.851.820	96.180.367	4.671.453,00	99,01
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	847.984.192	13.333.703.192	10.045.516.280	3.288.186.912	87,17
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	709.173.182	13.206.449.682	9.918.689.110	3.287.760.572	87,05
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	101.696.410	112.256.410	111.300.358	956.052	100
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	607.476.772	13.094.193.272	9.807.388.752	3.286.804.520	86,94
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	138.811.010	127.253.510	126.827.170	426.340	100
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	138.811.010	127.253.510	126.827.170	426.340	100
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	251.801.947	234.795.299	212.371.682	22.423.617	96
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	251.801.947	234.795.299	212.371.682	22.423.617	96
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	251.801.947	234.795.299	212.371.682	22.423.617	95,55



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal	PAGU AKHIR	REALISASI		
			KEUANGAN	SISA	FISIK
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.664.590.855	2.761.813.855	2.711.597.768	50.216.087	100
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.862.791.071	2.020.408.071	1.972.053.820	48.354.251	100
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.862.791.071	2.020.408.071	1.972.053.820	48.354.251	100
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	697.806.740	637.412.740	635.651.688	1.761.052	100
Verifikasi Mutu Produk	122.042.000	122.042.000	121.793.520	248.480	100
Pengembangan Layanan Pengujian	433.147.740	391.155.740	390.216.157	939.583	100
Pengembangan Layanan Sertifikasi	142.617.000	124.215.000	123.642.011	572.989	100
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	103.993.044	103.993.044	103.892.260	100.784	100
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	103.993.044	103.993.044	103.892.260	100.784	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.605.226.405	3.500.429.405	3.474.657.903	25.771.502	99,95
PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.335.763.785	3.257.366.785	3.235.706.933	21.659.852	99,95
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2.335.763.785	3.257.366.785	3.235.706.933	21.659.852	100
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	882.863.900	1.309.501.900	1.306.041.338	3.460.562	100
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.186.499.300	1.738.164.300	1.728.434.355	9.729.945	99,91
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	266.400.585	209.700.585	201.231.240	8.469.345	100
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	119.354.545	92.954.545	92.427.250	527.295	100
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	119.354.545	92.954.545	92.427.250	527.295	100
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	119.354.545	92.954.545	92.427.250	527.295	100
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	150.108.075	150.108.075	146.523.720	3.584.355	100



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal	PAGU AKHIR	REALISASI		
			KEUANGAN	SISA	FISIK
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	150.108.075	150.108.075	146.523.720	3.584.355	100
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	150.108.075	150.108.075	146.523.720	3.584.355	100

Dari tabel 2.1 dapat disampaikan realisasi keuangan 92,89% dari 2 program, 20 kegiatan, 28 sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 dan realisasi fisik 96,81% dan realisasi keuangan 92,89%. Realisasi fisik & Keuangan terendah ada pada beberapa program yaitu :

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API), sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA dengan realisasi fisik 99,01 % & 95,37% realisasi keuangan. Realisasi Fisik ini tidak mencapai 100% karena adanya item belanja cetak senilai Rp. 1.001.500,- yang tidak dibelanjakan. Dan realisasi keuangan tidka mencapai 100% karena adanya sisa belanja yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, sub kegiatan perasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan realisasi fisik 86,94 % dan 74,90 % realisasi keuangan. Ketidakcapaian atas kinerja ini karena adanya sisa dari dari DID IF tahun Berjalan Inflasi 3 Tahun anggaran 2023 yang tidak dapat dibelanjakan karena karena rentang waktu pertanggungjawaban kegiatan yang terbatas pada tahun anggaran.
- c. Program Pengembangan Export, Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor



Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi, sub kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan dengan realisasi fisik 95,55% dan realisasi keuangan 90,45%. Realisasi capaian tidak memenuhi target 100% fisik karena terdapat item belanja honorarium narasumber dan belanja perjalanan dinas luar negeri yang tidak terealisasi. dan realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena terdapat sisa-sisa belanja yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.

- d. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan realisasi fisik 99,91% dan realisasi keuangan 99,44%. Ketidakcapaian atas target fisik dan keuangan ini karena adanya belanja jasa tenaga kebersihan gallery dekranasda senilai Rp. 1.500.000 yang tidak digunakan karena di tahun 2023 Dekranasda telah memiliki bangunan sendiri sehingga tidak menggunakan lagi tenaga kebersihan sehingga realisasi fisik tidak mencapai 100% dan terdapat silva atas belanja lainnya.

Untuk pencapaian realisasi fisik rata-rata mencapai 100% dan realisasi keuangan tertinggi pada nilai 99,97% pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 99,96% keuangan.

Sedangkan indikator kinerja sasaran Dinas Kumperindag, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 : Indikator Sasaran Diskumperindag Prov. Gorontalo Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	74,5	78,41	105,25
Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)	Jumlah Koperasi Berkualitas	20	22	110
	Jumlah UKM yang berdaya saing	60	50	83,33
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	0,78%	17,97%	2304,87



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya nilai ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor	\$14.102.573	\$37.959.205	269

Dari tabel 2.2 tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai Sakib
capaian indikator sasaran strategis di tahun 2023 jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 telah mencapai target yag telah ditetapkan sebanyak 105,25%. Dari target 74,5% dan realisasi 78,41%.
- b. Jumlah Koperasi Berkualitas
Capaian indikator kinerja jumlah koperasi berkualitas jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 sebesar 110%. Dengan target 20 koperasi dan realisasi 22 koperasi. Dimana untuk koperasi berkualitas berdasarkan pemeringkatan. Aspek penilaian yaitu kelembagaan, usaha, keuangan, manfaat koperasi terhadap anggota, manfaat koperasi terhadap masyarakat. Dengan hasil pemeringkatan sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas dan tidak berkualitas
- c. Jumlah UKM yang Berdaya Saing
Capaian indikator kinerja Jumlah UKM yang Berdaya Saing jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 sebesar 83,34%. Dengan target 60 UKM dan realisasi 50 UKM
Capaian indikator kinerja Jumlah UKM yang Berdaya Saing sebesar 83,34%, capaian ini berdasarkan target pada dokumen Renstra 60 UKM. Dengan indikator penilaian dari produktifitas produksinya, peningkatan pangsa pasar dan pertumbuhan output.
- e. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah
Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah jika dibandingkan dengan target Renstra 2023-2026 dan realisasi tahun 2023 sebesar 17,97 %.
- f. Jumlah Nilai Ekspor
Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor jika dibandingkan dengan dokumen renstra 2023-2026 adalah sebesar 269 %, dimana target renstra \$14.102.573 dengan realisasi \$37.959.205



Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Industri Kecil Menengah dan Perdagangan di Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPD Tahun 2023 – 2026, menunjukkan adanya peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi untuk capaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah tidak mencapai target karena data IKM laporan kabupaten/kota tahun 2023 belum fix hingga 18 Januari 2024 untuk melakukan inputan pada aplikasi SIIDG sehingga Data jumlah industri tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 (antara lain Kabupaten Pohuwato). Akan tetapi hasil updating data terbaru di SIIDG diawal Juli 2024 Jumlah IKM tahun 2023 meningkat yaitu 13.210 IKM dan tahun 2022 sebanyak 11.197 IKM, sehingga indikator sasaran tahun 2023 telah tercapai.

Evaluasi pelaksanaan program tahun 2023 dan progres 2023 dilakukan terhadap indikator kinerja hasil program sebagai berikut:

Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2023		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100	%	100
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	20	Koperasi	22
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang	400
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	15	Unit Usaha	60
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	100	Unit Usaha	50
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	30	Unit Usaha	50
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36	Dok	36



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2023		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	1	Dokumen	1
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri	12	Dokumen	12
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang difasilitasi dan diawasi	2	Dok	8 Dok (8 Perush)
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTIHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting	28	Laporan	28
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	6	Komoditi	7
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	5	Dokumen	5 Dok

Dari tabel 2.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada 13 (tiga belas) program di tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan kecuali 1(satu) program yaitu program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm) dengan indikator jumlah UKM yang berdaya saing. Ketidakcapaian untuk target kegiatan ini karena masih kurangnya anggaran untuk melakukan pembinaan dan bedah produk melalui dan kurasi produk ukm.

Jumlah koperasi Sehat. Adapun target yang ditetapkan di akhir periode RPD sebanyak 60 koperasi sehat. Adapun untuk capaian tahun 2023 adalah sebanyak 22 koperasi sehat dengan target sebanyak 20 Koperasi sehatf. Adapun data keragaan koperasi tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Data Perkembangan Koperasi di Provinsi Gorontalo
Tahun 2021 – 2023

NO	URAIAN	2021	2022	2023
1.	Jumlah Koperasi (Unit)	1387	1414	1476
	- Koperasi Aktif (unit)	957	985	1042
	- Koperasi Tidak Aktif (unit)	430	429	434



NO	U R A I A N	2021	2022	2023
	- RAT Koperasi (unit)	221	252	245
2.	Jumlah Anggota (Org)	142.713	144.415	146.926
3.	Total Asset (Rp. 000)	551.366.521	572.374.634	729.454.672
	- Modal Sendiri	306.039.971	333.383.296	507.993.442
	- Modal Luar	209.392.718	218.373.188	211.188.473
4.	Volume Usaha (Rp. 000)	414.931.109	414.951.877	361.764.790
5.	SHU (Rp. 000)	28.393.614	30.508.386	29.303.701

Sumber : Online Data System

Tahun 2023 persentase koperasi tidak aktif sebesar 70,6 persen terhadap total jumlah koperasi. Begitupun untuk koperasi yang telah melaksanakan RAT sebesar 23,52 persen terhadap jumlah koperasi aktif ditahun 2023. Untuk jumlah koperasi yang melaksanakan RAT ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Terhadap hal ini telah dilakukan beberapa upaya antara lain melakukan revitalisasi koperasi dan pembinaan koperasi di kabupaten/Kota menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Adapun data Keragaan Koperasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.5. Data Keragaan Koperasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2023

N O	U R A I A N	Aktif	Tidak Aktif	Total Koperasi	RAT (unit)	Jumlah Anggota	Total Aset (Rp. 000)	Volume Usaha (Rp. 000)	SHU (Rp. 000)
1.	Kota Gorontalo	196	146	342	90	40.379	114.770.470	104.966.686	11.960.152
2.	Kab. Gorontalo	356	78	434	60	45.022	403.229.167	179.514.131	8.701.675
3.	Kab. Boalemo	92	61	153	12	15.179	57.280.434	11.183.626	364.872
4.	Kab. Pohuwato	98	37	135	9	13.989	29.919.849	16.928.746	1.055.704
5.	Kab. Bone Bolango	107	58	165	31	16.959	60.227.372	16.928.746	4.537.921
6.	Kab. Gorontalo Utara	95	40	135	13	11.563	27.231.497	15.656.785	1.689.458
7.	Prov. Gorontalo	98	14	112	30	3.835	36.795.883	16.586.070	993.919
JUMLAH		1.042	434	1.476	245	146.926	729.454.672	361.764.790	29.303.701

Sumber : Online Data System

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini antara lain dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu :

a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi

Tujuan Pelaksanaan kegiatan :

- Meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;



- Meningkatkan fungsi Pengawasan Koperasi yang efektif dan efisien, sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
 - Meningkatkan Kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi dengan peraturan yang berlaku.
- Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ini dilakukan pada Koperasi Primer Provinsi Gorontalo serta monitoring dan evaluasi koperasi berprestasi
- b. Rapat Ekspose Hasil Pengawasan Koperasi yang menghasilkan laporan hasil pengawasan koperasi Se-Provinsi Gorontalo baik yang didanai APBD dan APBN (Satgas Pengawas Koperasi Se-Provinsi Gorontalo)
- Tujuan Pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyatukan persepsi bersama dalam pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota Se-Provinsi Gorontalo, sehingga dapat meningkatkan fungsi pengawasan koperasi yang efektif dan efisien di Provinsi Gorontalo serta Memperkuat komitmen penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan koperasi di Provinsi Gorontalo. Peserta Kepala Dinas, Kepala Bidang Koperasi, Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo 38 Orang.
- c. Dalam pencapaian kinerja program yaitu jumlah koperasi sehat terdapat 4 (empat) aspek pemeriksaan kesehatan koperasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi No. 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi yaitu aspek tata kelola, aspek kinerja keuangan, aspek profil risiko dan aspek permodalan. Terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat diberikan sertifikat kesehatan. Terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus ditindaklanjuti dengan sanksi administratif. Sertifikat kesehatan atau sanksi administratif ditetapkan oleh deputy/perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan LHPKK.

Adapun capaian Koperasi sehat tahun 2023 sebagai berikut :



Tabel 2.6
Jumlah Usaha Simpan pinjam Oleh Koperasi yang dinilai Kesehatannya
Per 31 Desember 2023

NO	NAMA KOPERASI	NO DAN TGL BADAN HUKUM KOPERASI	ALAMAT KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
1.	KSP KOPERASI PRIMER KESEHATAN DAERAH	372/BH/V, Tgl. 26 November 1982 AHU-0002766.AH.01.38.TAHUN 2022 23 Desember 2022	Jl. H. Moh. Non Pango, SE Kec. Limboto Kab. Gorontalo	S. Pinjam	Sehat
2.	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WIYOWA	07/BH/518/DTKTK/IV/04 13 April 2004	Kel. Limba U II Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo	Konsumen	Sehat
3.	KOPERASI SERBA USAHA KARYA PRASETYA	36/BH/XXII/VII/2015 15 Juli 2015	Kel. Botu Kec. Kota Timur Kota Gorontalo	Konsumen	Sehat
4.	KSP KARYA CIPTA DANA PROVINSI GORONTALO	33/BH/XXII/XII/2014 22 Desember 2014	Jl. Bulila Desa Bulota Kab. Gorontalo	S. Pinjam	Sehat
5.	KSP AL HIKMAT PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	31/BH/XXII/III/2014 21 Maret 2014	Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo	S. Pinjam	Sehat
6.	KPRI WIRA USAHA BARU	21/BH/XXII/III/2011 18 Maret 2011	Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango	S. Pinjam	Sehat
7.	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KARTIKA OTANAHA	1449/BH/V, Tgl. 8 Juni 1971 PAD No. AHU-000142.AH.01.27 TAHUN 2021 Tgl. 19 Oktober 2021	Jl. Jend. Sutoyo 25, Kec. Kota Sel. Kota Gorontalo	Konsumen	Sehat
8.	KOPERASI KONSUMEN SYARIAH EL MADANI BAPPEDA PROV. GORONTALO	AHU-0009265.AH.01.26 TAHUN 2021 23 Maret 2021	Jl. By Pass Kel. Tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo	Pemasaran	Sehat
9.	KOPERASI JASA TRANSPORTASI ANGKASA GORONTALO	005994/BH/M.KUMKM.2/X/2017 31 Oktober 2017	Desa Tolotio Kab. Gorontalo	Jasa	Cukup Sehat
10.	KOPERASI PRODUSEN HUYULA	AHU-0004076.AH.01.29.TAHUN 2022	Kel. Kayubulan	S. Pinjam	Cukup Sehat



NO	NAMA KOPERASI	NO DAN TGL	ALAMAT KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
		BADAN HUKUM KOPERASI			
	MOMONGU LIPU	04 Agustus 2022	Kab. Gorontalo		
11.	KOPERASI KONSUMEN TUNAS KARYA MUDA	AHU-0014845.AH.01.26.2022 18 Januari 2022	Jl. Martin Liputo No. 500 Desa Bulalo Kab. Gorontalo Utara	Konsumen	Cukup Sehat
12.	KOPERASI KONSUMEN PERMATA SEJAHTERA HULONTHALAGI	AHU-0016261.AH.01.26.TAHUN 2022 13 Maret 2022	Jl. Kempas Desa Poowo Kab. Bone Bolango	Konsumen	Cukup Sehat
13.	KOP. KONS. KARYAWAN TIRTA BONE PDAM KOTA GORONTALO	250/BH/V, Tgl. 23 Januari 2012 PAD No. AHU-0002276.AH.01.27.TAHUN 2021 Tgl. 11 Mei 2021	Jl. Achmad Nadjamudin Kota Gorontalo	Konsumen	Cukup Sehat
14.	KOPERASI JASA ANGKUTAN KRAWANG JAYA BERSAMA	012522/BH/M.KUKM.2/II/2019 28 Pebruari 2019	Kel. Huangobotu Kec. Dungingi Kota Gorontalo	Jasa	Cukup Sehat
15.	KOPERASI JASA ANGKUTAN MITRA USAHA GORONTALO	AHU-0002525.AH.01.29.TAHUN 2022 06 Juni 2022	Jl. Dunian No. 57 Kota Gorontalo	Jasa	Cukup Sehat
16.	KOPERASI JASA SEGALA SAGELA SEJAHTERA	AHU-0009974.AH.01.26.TAHUN 2021 26/04/2021	Jl. Adam Zakaria Kota Gorontalo	Jasa	Cukup Sehat
17.	KSP DHANA PANEN RAYA	AHU-0015444.AH.01.26.TAHUN 2022 9 Pebruari 2022	Jl. Nani Wartabone No. 27 Kota Gorontalo	S. Pinjam	Cukup Sehat
18.	KOPERASI PEMASARAN PUSKOWAPI MOMONGU LIPU PROV. GORONTALO	AHU-001597.AH.01.26.TAHUN 2022 31 Januari 2022	Jl. Taman Surya I Kota Gorontalo	Pemasaran	Cukup Sehat
19.	KSP SURYA UMG	27/BH/XXII/V/2013 30 Mei 2013	Desa Pentadio Timur Kab. Gorontalo	S. Pinjam	Cukup Sehat
20.	KOPERASI KONSUMEN BATARA BTN GORONTALO	450/BH/V/07 20 April 2007	Jl. Nani Wartabone Kota Gorontalo	Konsumen	Cukup Sehat
21.	KOPERASI KONSUMEN CAHAYA	AHU-0005342.AH.01.29.TAHUN 2022	Jl. Aloei Saboe	Konsumen	Cukup Sehat



NO	NAMA KOPERASI	NO DAN TGL	ALAMAT KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
		BADAN HUKUM KOPERASI			
	MITRA SEJAHTERA	7 Oktober 2022	Kota Gorontalo		
22	KOPERASI JASA SIFAHYU JAYA MANDIRI	AHU-0016879.AH.01.26.2021 29 Maret 2021	Jl. Sirsak Kel. Tomulabutao Kota Gorontalo	Jasa	Cukup Sehat

Sumber : Bidang Kelembagaan & Pengawasan, Diskumperindag Prov. Gorontalo 2024

Jumlah SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya, pada kegiatan **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** realisasi yang dicapai sebesar 400 KUKM dari target yang ditetapkan sebesar 390 KUKM ditahun 2023, Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini antara lain dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perkoperasian di dilaksanakan di 20 Koperasi yang tersebar di Kab/Kota se Provinsi Gorontalo. Tujuan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perkoperasian
 - Memberikan Edukasi kepada koperasi yang telah memperoleh hadiah di tahun 2022 sebagai bahan evaluasi terkait pemanfaatan dana untuk pengembangan usaha koperasi
 - Melakukan sosialisasi kepada Koperasi calon penerima bantuan tahun 2023 dan tahun 2024 terkait program yang ada di dinas dan pemanfaatanx di prioritaskan untuk pengembangan usaha koperasi
 - Melakukan pembinaan kepada Koperasi yang belum melaksanakan RAT, terkait kendala yang menyebabkan koperasi belum melaksanakan RAT, mencari solusi dengan memberikan edukasi dari aspek kelembagaan, usaha dan Permodalan Koperasi.
- b. Rapat Pembinaan bidang Koperasi dan Tenaga Pendamping Koperasi tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 12 kali yang di dilaksanakan di Provinsi Gorontalo sebanyak 12 kali. Kegiatan ini sebagai media koordinasi dan konsolidasi antara Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi Gorontalo dengan tenaga Pendamping KUKM dalam rangka mencari solusi permasalahan terhadap pemberdayaan koperasi



- c. FGD Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan penataan kelembagaan koperasi yang dilaksanakan 1 (satu) kali di Provinsi Gorontalo. Narasumber dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi & UKM RI serta Pimpinan Kantor Pajak Pratama Provinsi Gorontalo dengan jumlah 70 peserta dari gerakan koperasi (anggota, pengurus dan pengawas koperasi), aparat Dinas koperasi kabupaten/kota serta pendamping koperasi.

Selain itu pencapaian indikator ini juga didukung oleh kegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi serta pelaku usaha bagi UKM di Provinsi Gorontalo (DAK) yaitu Peningkatan kapasitas SDM Koperasi.** Pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi tahun 2023, dilaksanakan 8 angkatan dengan jumlah peserta 200 orang yang berasal dari koperasi binaan Kab/Kota dan Provinsi. Untuk koperasi binaan Provinsi berjumlah 30 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari Pengurus Pengawas dan anggota Koperasi dalam mengelola koperasi agar lebih kuat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sehingga koperasi dapat mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Tahap I terdiri atas 4 angkatan dan tahap II terdiri atas 4 angkatan.

Tahap I :

Pelaksanaan Tanggal 04 s.d 07 Mei 2023

- | | | |
|---|------|---------|
| 1. Pelatihan Akuntansi Koperasi | : 25 | peserta |
| 2. Pelatihan Nilai dasar & Jati Diri Koperasi | : 25 | peserta |

Pelaksanaan Tanggal 07 s.d 10 Mei 2023

- | | | |
|---|------|---------|
| 3. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT | : 25 | peserta |
| 4. Pelatihan Akuntansi Koperasi Berbasis IT | : 25 | peserta |

Tahap II :

Pelaksanaan Tanggal 08 s.d 11 November 2023

- | | | |
|------------------------------------|------|---------|
| 1. Pelatihan Akuntansi Koperasi II | : 25 | peserta |
| 2. Pelatihan Pengawasan Koperasi | : 25 | peserta |

Pelaksanaan Tanggal 11 s.d 14 November 2023

- | | | |
|---|------|---------|
| 3. Pelatihan Koperasi Berbasis Bisnis | : 25 | peserta |
| 4. Pelatihan Kompetensi Koperasi Berbasis SKKNI | : 25 | peserta |

(Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia)



Jumlah Koperasi Aktif, pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Outcome program ini adalah Jumlah koperasi Jumlah Koperasi Aktif (15 Unit usaha). Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini antara lain dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu :

a. Temu Mitra Pemberdayaan Koperasi

Tujuan Pelaksanaan kegiatan :

- Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi Gorontalo, Kabupaten/Kotadan Pihak Pembiayaan dalam hal Penguatan Kelembagaan dan permodalan Koperasi.
- Mencari Solusi Permasalahan terhadap Koperasi yang belum dapat mengakses program KUR dan Program UMI.

Sasaran Pelaksanaan kegiatan

- Terciptanya persamaan persepsi antara Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi Gorontalo, Kabupaten/Kotadan Pihak Perbankan dalam hal Akses Pembiayaan Koperasi dan UMKM.
- Diperolehnya Solusi permasalahan terhadap Koperasi yang belum dapat mengakses Program KUR dan Program UMI

Kegiatan Temu Mitra diikuti peserta sejumlah 15 (lima belas) orang yang

terdiri dari Gerakan Koperasi dan Dinas Kota serta Dinas Provinsi yang membidangi Koperasi dan UKM dengan Nara sumber pada Kegiatan Temu Mitra pemberdayaan Koperasi yaitu Kepala Dinas kabupaten/Kota, Pimpinan Bank Sulutgo Cabang Gorontalo dan Deputi PT Pegadaian di Gorontalo

- b. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi pada APBD-P mendapat tambahan anggaran sejumlah Rp. 310.560.000,- yaitu belanja jasa tenaga pelayanan umum (1 orangx22 hari x 4 bulan) Rp. 10.560.000,- dan belanja hibah uang kepada koperasi (koperasi konsumen Dekranasda Provinsi Gorontalo) Rp. 300.000.000,-
- c. Pemberian Penghargaan atau hadiah kepada Koperasi Sehat Kepatuhan, sebesar Rp.150.000.000,- telah direvisi ke belanja barang



untuk dijual /diserahkan kepada masyarakat (stimulan bantuan bagiUMKM) program pemberdayaan usaha mikro, usaha menengah, usaha kecil melalui Persetujuan DPR No. 160/DPRD/1212/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 dengan pertimbangan revisi pemberdayaan terhadap UMKM berupa penguatan terhadap permodalan melalui belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan UMKM.

- d. Jumlah pelaku usaha yang mengakses permodalan (KUR & UMI) berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan RI sebanyak 26.961. dengan nilai kredit sebesar Rp. 767.870.039.086,- dan Outstanding sebesar Rp. 506.927.919.360,-.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kinerja ini antara lain dilakukan melalui kegiatan temu mitra dengan sumber dana APBD

Dalam mencapai target kegiatan pada urusan koperasi ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target tersebut antara lain :

- a. Makin banyaknya KUMKM yang memiliki usaha yang bankable (layak dari sisi usaha untuk didanai bank) sehingga kepercayaan bank terhadap KUMKM juga meningkat.
- b. Terjalannya koordinasi yang baik antara Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dengan BI dan Bank Pelaksana di daerah dalam rangka penyaluran dan monitoring evaluasi KUR.
- c. Makin baiknya koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan kabupaten/kota.
- d. Meningkatnya kesadaran pengurus dan pengawas untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan manajemen usaha koperasi, yang ditandai dengan makin meningkatnya jumlah koperasi yang menerapkan manajemen usaha yang baik dan sistem akuntansi serta komputerisasi dan internet (IT).
- e. Adanya dukungan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana dekonstrasi sehingga dapat membantu pencapaian target kegiatan tahun anggaran 2023



Dibalik upaya pencapaian kinerja sasaran serta program dan kegiatan tersebut diatas, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain :

1. Anggaran pelaksanaan kegiatan direfocusing sehingga beberapa target kegiatan tidak dapat dicapai antara lain pelaksanaan RAT pada beberapa koperasi tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga dibutuhkan upaya yang keras untuk dapat dicapai di tahun berikutnya.
2. Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi UKM khususnya dalam penerapan regulasi perkoperasian yang diindikasikan oleh besarnya koperasi yang tidak aktif sehingga Secara umum kualitas SDM pengurus dan pengawas koperasi perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, pemasaran hasil dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Koordinasi antar sektor dalam hal pembinaan pengembangan dan pemberdayaan KUKM belum optimal, SDM pengelola koperasi sangat terbatas menyebabkan realisasi pelaksanaan RAT koperasi masih sangat rendah,
4. Masih tingginya jumlah koperasi tidak aktif mengakibatkan peran koperasi sebagai soko guru perekonomian menjadi kurang optimal.
5. Permasalahan internal koperasi yang sering menjadi penyebab tidak berjalannya roda organisasi (belum berfungsinya perangkat organisasi).
6. KUR merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu koperasi dan UMKM yang usahanya layak untuk dibiayai tetapi memiliki keterbatasan modal, sehingga perlu diberikan modal hingga batas tertentu tanpa agunan. Namun pada kenyataannya, mekanisme perbankan yang mengharuskan adanya jaminan/agunan menyebabkan KUMKM sulit untuk bisa mengakses KUR.
7. Sulitnya mendapatkan data penerima KUR *by name by address* dari pihak perbankan, sehingga Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan SKPD kabupaten/kota sulit untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat keberhasilan UMKM setelah menerima KUR.

Jumlah UKM Yang Berdaya Saing, pada tahun 2023 target UKM yang berdaya saing sebanyak 100 unit usaha dan realisasinya mencapai 50



unit usaha. 2 (dua) Kegiatan lainnya yang dilaksanakan ditahun 2023 untuk mendukung ketercapaian target ini antara lain :

- a. Sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Kalangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.

Output Kegiatan ini adalah :

1. Bedah Produk bagi UMKM sebanyak 25 UKM/pelaku usaha se Provinsi Gorontalo. Tujuan bedah Produk terkait kesesuaian perizinan dengan produk, kapasitas produksi, kemasan serta pemasaran. *(daftar peserta terlampir)*
2. Mentoring UMKM berbasis Syariah sebanyak 25 UKM/pelaku usaha se Provinsi Gorontalo pada 11 LKSA/Pontren/madrasah di Provinsi Gorontalo. Tujuannya untuk melaksanakan monitoring kepada para pelaku UMKM yang berbasis syariah terhadap pengembangan usaha yang telah di fasilitasi bantuan maupun pelatihan. *(terlampir)*
3. Stimulan Pengembangan produk bagi UMKM sebanyak 65 UKM di Provinsi Gorontalo yaitu bantuan bahan produksi bagi UKM olahan kue di Kota Gorontalo (35 UKM), Kabupaten Bone Bolango 21 UMKM dan Kabupaten Gorontalo 9 UMKM. Untuk usaha olahan kue masing-masing UKM menerima bahan produksi yaitu :
 - a. Tepung terigu 10 kg
 - b. Mentega Kaleng 7 Kg
 - c. Susu Kaleng 10 Kaleng
 - d. Susu Full cream 3 Dus
 - e. Minyak Goreng 10 Liter
 - f. Gula Pasir 10 Kg
 - g. Tepung Beras 11 Kg
4. Stimulan Pengembangan produk bagi UMKM sebanyak 163 UKM di Provinsi Gorontalo yang diperuntukkan bagi bahan produksi bagi UKM olahan kue, kios dan warung makan



b. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi serta pelaku usaha bagi UKM di Provinsi Gorontalo (DAK Non Fisik KUKM)

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UKM tahun 2023 dilaksanakan 5 angkatan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM UMKM dengan jumlah peserta 125 orang yang berasal dari Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo dan Kabupaten Pohuwato dan Sosialisasi layanan bantuan hukum bagi UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk dalam rangka peningkatan SDM bagi pelaku usaha serta pemahaman terhadap hukum bagi 290 UKM/IKM/Pelaku se Provinsi Gorontalo.

Tahap I : Pelaksanaan Tanggal 09 s.d 12 Mei 2023

1. Diklat Akuntansi Laporan Keuangan Tahun 2023 : 25 peserta
(Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Bone Bolango dan Kab. Gorontalo)
2. Diklat Kewirausahaan Bagi UMKM Tahun 2023 : 25 peserta
(Kabupateen Bone Bolango, Goorntalo Utara, Boalemo, Pohuwato)
3. Diklat Produksi Olahan Pangan yang baik & Packaging bagi UMKM
: 25 Peserta
4. Sosialisasi Layanan Hukum bagi UMKM Tahun 2023 : 65 peserta
(2 angkatan)

Tahap II Pelaksanaan 9 s/d 12 November 2023

1. Diklat Sertifikat Jaminan Halal : 25 Peserta
2. Diklat Strategi dan teknik Pemasaran : 25 peserta
3. Sosialisasi Layanan Hukum bagi UMKM Tahun 2023 : 70 peserta
(2 angkatan)

Jumlah UKM Yang Bertransformasi Usaha, pada tahun 2023 targetnya sebesar 30 unut usaha dengan realisasi capaian 50 unit usaha. pencapaian ini dilakukan antara lain dengan memaksimalkan pada beberapa kegiatan antara lain :

- a. Terlaksananya Pelatihan vocational 25 peserta (soft skill training, bimtek pengolahan produk) di Kota Gorontalo. Tujuanya adalah meningkatkan keterampilan /skill teknis SDM UMKM dalam mengelola usaha khususnya pada sektor prioritas



- b. Pelaksanaan Indonesia Fashion Week, dilaksanakan bulan Februari 2023 yang melibatkan 15 Designer Dari Gorontalo, Pameran Produk Unggulan Daerah, Talk Show, Fashion Show. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan promosi sulaman karawo Gorontalo pada Indonesian Fashion Week, meningkatkan daya saing perancang lokal menghadapi era perdagangan bebas.
- Adapun produk unggulan yang dipamerkan pada kegiatan Indonesian Fashion Week yaitu Kerajinan karawo, produk pangan .
- c. Gebyar UMKM, diikuti oleh 50 UKM dari Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di City Mall. Yaitu pameran produk unggulan Gorontalo selama 3 hari pelaksanaan yang dirangkaikan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
- d. Harvesting Puncak rangkaian Gernas BBI dan BBWI Tahun 2023, bertujuan untuk mendorong penggunaan produk lokal agar bisa menguasai pasar domestik dan internasional. Pelaksanaan kegiatan di GPC Kota Gorontalo. Kegiatan ini diikuti oleh UKM/IKM se-Provinsi Gorontalo.
- e. Stimulan pengembangan produk bagi UMKM sebanyak 9273 UMKM yaitu. bantuan ini diperuntukan bagi UKM Olahan pangan, Kios, warung makan, aneka minuman Se Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada juknis yang berlaku.

Adapun perkembangan Jumlah UKM tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Rekap Data UMKM Tahun 2021 – 2023
Per Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

WILAYAH	2021			2022			2023		
	MIKRO	KECIL	MENENGAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH
KOTA GORONTALO	11415	2692	400	11415	2692	400	11560	2692	400
KAB. GORONTALO	43.124	422	13	29.596	419	12	30.285	419	12
KAB. BOALEMO	10227	1499	202	10193	1493	202	10201	1493	202
KAB. POHUWATO	10.684	240	104	10.914	85	19	11.629	87	19
KAB. BONE BOLANGO	7862	205	37	7699	174	26	7830	174	26
KAB. GORONTALO UTARA	5475	213	15	5475	213	15	5475	213	15
JUMLAH	88.787	5.271	771	75.292	5.076	674	76.980	5.078	674

Sumber : Bidang Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi Usaha Kecil,
Diskumperindag Provinsi Gorontalo



Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah UMKM di di tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 dan 2023. Hal ini akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat membuka berbagai jenis usaha baru yang berakibat bertambahnya unit usaha UMKM di 2021 tersebut. Pasca pandemi covid jumlah umkm ini kembali menurun dimana masyarakat kembali ke aktivitas awal mereka seperti berkerja kantoran, swasta. dll..

Perkembangan jumlah UMKM belum diikuti dengan peningkatan produktifitas, daya saing usaha dan permodalan, sehingga UMKM di Gorontalo cenderung rentan dengan gejolak dan tekanan ekonomi, terlebih jika ada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. perkembangan kuantitas KUMKM belum dibarengi dengan perkembangan kualitas yang dapat memberi nilai tambah yang besar bagi pelaku usaha. Hal ini disebabkan KUMKM Provinsi Gorontalo belum didukung sepenuhnya dengan permodalan yang cukup, teknologi tepat guna, dan promosi produk untuk pemasaran yang efektif serta belum didukung oleh kemitraan, subkontrak, waralaba (*franchise*), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (*joint venture*), bagi hasil.

Perkembangan UMKM ini harus terus dibarengi dengan berbagai upaya untuk peningkatan usaha para pelaku usaha UMKM, karena masih ada beberapa faktor yang harus diupayakan agar pencapaian target program akan lebih maksimal antara lain :

1. Peningkatan peran pendamping pusat layanan usaha terpadu (PLUT) dalam melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan bagi UKM/IKM melalui Kelas Bisnis UMKM, pelatihan dan pendampingan secara online maupun offline serta menjadikan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menjadi pusat informasi dan konsultasi tentang berbagai aspek usaha, perizinan, peluang bisnis, regulasi terbaru dan lain-lain bagi pelaku usaha
2. Dalam upaya pemulihan ekonomi dan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah menuntut Pemerintah untuk melaksanakan program-program yang sifatnya untuk mengintervensi UMKM seperti Pemberian bantuan bahan produksi kepada UMKM yang tepat sasaran.



- 3. Peningkatan pemahaman pelaku usaha kecil untuk memformalkan usahanya melalui pengurusan perijinan, dimana hal ini merupakan salah satu persyaratan untuk bisa mengakses modal perbankan.
- 4. Sinergitas program yang bersumber dari APBD dan APBN sangat dibutuhkan sehingga proses pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM di Provinsi Gorontalo tetap berjalan dengan baik dan maksimal.
- 6. Evaluasi terhadap pemanfaatan stimulan bantuan bagi para pelaku UMKM dilakukan secara intensif
- 7. Up-dating data UKM menjadi prioritas terhadap pengambilan keputusan/kebijakan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Tantangan kedepan dalam upaya mengembangkan koperasi dan UMKM adalah penguatan peran KUKM, dan pelaku usaha lainnya, memacu pertumbuhan investasi didaerah (optimalisasi pelaksanaan PERDA tentang kemudahan investasi; peningkatan peran perbankan selaku *agent of development* guna penguatan modal usaha; kerjasama antar daerah untuk promosi dan pemasaran produk dan peningkatan kerjasama perdagangan regional, nasional dan internasional.

Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri, adapun persentase capaian indikator program pengembangan industri kecil menengah tahun 2023 sebesar 100% dari target 36 Dokumen. Pencapaian ini adalah selain dari dukungan dana APBD juga mendapat dukungan penyelenggaraan kegiatan melalui dana dekonsentrasi. Kebijakan pembangunan perindustrian difokuskan pada peningkatan peran IKM dalam perekonomian daerah. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sangat besar karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Tabel 2.8. Perkembangan IKM Kabupaten/Kota. Tahun 2021 – 2023

No.	URAIAN	JUMLAH (unit usaha)		
		2021	2022	2023
1	Kota Gorontalo	3.554	2.646	2293
2	Kabupaten Gorontalo	3486	4292	4397
3	Kab. Bone Bolango	3.018	2.489	2694



No.	URAIAN	JUMLAH (unit usaha)		
		2021	2022	2023
4	Kab. Boalemo	1.050	1.090	1094
5	Kab. Pohuwato	2.547	895	1806
6	Kab. Gorontalo Utara	705	766	926
Jumlah		14.360	12.178	13.021

Sumber data: <https://siidig.gorontaloprov.go.id/home>

Tabel diatas menunjukkan pertumbuhan IKM 7 persen ditahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Kenaikan jumlah IKM di tahun 2021 dampak pandemi covid-19 dimana orang-orang beralih menjadi pelaku umkm, keberadaan IKM yang tetap bertahan dan tetap tumbuh walau dimasa pandemi covid-19. Pertumbuhan IKM ini didukung oleh jaringan pemasaran produk yang semakin luas, kebijakan pemerintah daerah yang makin berpihak terhadap IKM, antara lain penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis bagi IKM serta stimulan bantuan bagi IKM. Pelaksanaan kegiatan masih sangat membutuhkan dukungan anggaran yang cukup, agar bisa mencakup lingkup yang lebih luas dalam pembinaan dan penumbuhan IKM.

Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran adalah kegiatan penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri
 - ~ Pelatihan Pengembangan WUB di laksanakan di Kota Gorontalo
 - ~ Fasilitasi tempat usaha, bahan dan peralatan, listrik bagi IKM Pangan
 - ~ Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan di Kab.Boalemo.
 - ~ Fasilitasi Kemasan untuk 20 IKM Pangan kabupaten/kota
 - ~ Fasilitasi Sertifikat Halal bagi 20 IKM Pangan
- b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - ~ Pelatihan pengembangan Wirausaha Baru bagi 30 UKM/IKM/Pelaku usaha Industri Kerajinan, Sandang, Aneka dan Kerajinan ; Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angku
 - ~ Bantuan Bahan dan Peralatan IKM Industri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan bagi 6 UKM/IKM/Pelaku usaha Industri Kerajinan, Sandang, Aneka dan Kerajinan



- ~ Bantuan Bahan dan Peralatan IKM Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut bagi 8 UKM/IKM/Pelaku usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut
 - ~ Bantuan Kemasan bagi IKM Industri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan bagi 4 (empat) UKM/IKM/Pelaku usaha Industri Industri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan
 - ~ Pemeliharaan Hak Paten Karawo kepada pelaku industri kerajinan Karawo Gorontalo
 - ~ Pembinaan dan Pendampingan IKM IKSAK kepada pelaku industri kerajinan di Kabupaten/Kota
 - ~ Verifikasi dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan WUB kepada calon penerima bantuan IKM IKSAK dan ILMEA di kabupaten/Kota
 - ~ Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan/ Pengendalian IKM
 - ~ Pameran dan Rakernas Dekranas
 - ~ Kegiatan Rapat Dekranasda Provinsi Gorontalo
 - ~ Hibah kepada Dekranasda Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 200.000.000,-
 - ~ Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo bagi pelaku industri kerajinan
- c. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
- ~ Fasilitasi penyusunan RPIK Kabupaten/Kota.
pada tahun 2023 telah tersusun 2 dokumen RPIK yaitu Kabupaen Boalemo dan Kabupaten Pohuwato yang akan segera di Perdakan pada tahun 2024.
Tahapan Penyusunan RPIP telah selesai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2024 Nomor 9 Tahun 2022

Jumlah Izin yang difasilitasi dan dievaluasi, adapun persentase capaian indikator program Pengendalian Izin Usaha Industri tahun 2023 sebesar 100% dari target 1 Dokumen. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI,



IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Adapun Indikator Kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi : 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sebanyak 1 dokumen

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Fasilitasi pendampingan, konsultasi Perizinan khusus sektor Industri untuk Memberikan kemudahan untuk para IKM dan industri menengah dalam mendapatkan informasi serta pengurusan perizinan khususnya sektor Perindustrian.

Jumlah Informasi Industri & Fasilitasi Pengolahan Data Industri, persentase capaian indikator program pengelolaan sistem informasi industri nasional tahun 2023 sebesar 100% dari target 12 Dokumen. untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah : Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional :

- a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Indikator Kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sebanyak 12 Dokumen

Output kegiatan ini adalah:

- ~ Sosialisasi Aplikasi/Web sistem informasi Industri (SIINAS) yang dilaksanakan di Kota Gorontalo



~ Penganggaran untuk honorarium 4 (empat) orang penyusun data IKM di kab/kota yang dibayarkan setiap triwulan

Kebijakan pembangunan bidang industri difokuskan pada meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian, dengan sasaran utamanya adalah meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah.

Untuk mendorong pembangunan sektor industri melalui Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), peningkatan daya saing akan berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja hasil tersebut antara lain:

1. Dukungan dana dekonsentrasi dalam pembinaan dan pengembangan IKM
2. Koordinasi antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota terjalin dengan baik, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Kegiatan untuk mengurangi kemiskinan dengan pemberdayaan sesuai dengan data TKE
4. Penguatan kepada anak-anak putus sekolah di usia sekolah

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain :

- a. Tidak maksimalnya pelaksanaan program kegiatan, seperti fasilitasi bantuan bagi IKM, pembinaan pengembangan IKM dan pengawasan perizinan karena dukungan anggaran yang terbatas
- b. Kemampuan teknis dan kualitas SDM yang terbatas dalam mengembangkan usaha industri kecil menengah, mengembangkan desain produk serta kemasan IKM.
- c. Terhambatnya proses pengadaan bantuan bagi IKM karena proposal yang diajukan dari masing-masing calon penerima (melalui aspirasi DPR) belum memenuhi persyaratan yang sesuai Juknis sehingga harus dilakukan verifikasi berulang.
- d. Perlunya peningkatan pemahaman calon wira usaha baru
- e. Kurangnya dukungan dana di tingkat APBD Kabupaten/Kota

Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi, Outcome dari program ini adalah Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi



dengan target 2 dokumen dan capaian 8 dokumen dari 8 perusahaan yaitu PT. Biomas Jaya Abadi, PT. Pabrik Gula, PT. Multi Nabati Sulawesi, CV. Camar Laut, PT. Seger Agro Nusantara, PT. Dwi Karya Makmur, PT. Sinar pangan Abadi, PT. Milenium Agro Selebes.

Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

Indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal dengan target 8 dokumen, capaian 65 dokumen yaitu dokumen Surat Keterangan Asal.

Output kegiatan ini adalah :

a. Pengawasan dan monitoring Penerbitan Surat Keterangan Asal

Tujuan Pelaksanaan kegiatan yaitu pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor impor dan antar pulau di kabupaten/kota. Sasaran Pelaksanaan kegiatan ini adalah Pelaku Usaha, Eksportir, Perusahaan termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM/IKM) dan Instansi Terkait.

b. Fasilitas Diklat bagi aparatur dalam rangka peningkatan SDM

Tujuan Pelaksanaan kegiatan yaitu untuk meningkatkan kemampuan aparatur khusunya di bidang ekspor sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi organisasi dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh 3 (tiga) orang aparatur yaitu Diklat Prosedur ekspor yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Sumber daya manusia ekspor dan jasa perdagangan kementerian perdagangan RI di Jakarta

Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Outcome dari program ini adalah Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan target 28 Laporan, Capaian 28 Laporan yaitu Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dan Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan



Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya (12 laporan)

Pelaksanaan Program :

Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

✚ **Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan sub kegiatan :

Pemantauan Harga Barang Pokok di Pasar Rakyat di Kabupaten/Kota setiap hari kerja, dilakukan dalam rangka mengidentifikasi ketersediaan barang pokok, sekaligus mengumpulkan informasi harga barang pokok yang berlaku saat itu di Pasar Rakyat, apakah terjadi kenaikan harga ataukah terjadi penurunan harga, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan, ataupun dasar pelaksanaan Operasi Pasar/Kebutuhan Pokok Bersubsidi.

✚ **Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

Output kegiatan ini adalah :

Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi tahun 2023 yang dilaksanakan 73 kali di kabupaten kota se Provinsi Gorontalo, dengan jumlah penerima 83.266 penerima.

Pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah dilakukan melalui Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi. Kegiatan ini dilakukan menjelang hari besar keagamaan (HBKN), saat adanya potensi kenaikan harga komoditi barang kebutuhan pokok dan kegiatan yang terkait pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat dan bencana. Dengan menyediakan secara keseluruhan atau sebagian diantaranya yaitu komoditi antara lain beras, minyak goreng dalam kemasan dan minyak goreng olahan (minyak kampung), gula Kristal putih bukan rafinasi, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, ikan tuna dan atau



barang kebutuhan pokok masyarakat lainnya serta Honorarium pengolah data harga dan informasi harga barang pokok dan barang penting.

Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi

Output Kegiatan :

- a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dilaksanakan di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo

Kegiatan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian. Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan pasokan dan ketersediaan pupuk bersubsidi di semua lini tersalurkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan. Pengawasan dimulai dari gudang penyimpanan produsen, distributor, hingga pengecer. Semua pelaku usaha pupuk bersubsidi yang ditunjuk dan ditetapkan wajib melaksanakan penyaluran, penjualan, dan penyimpanan, sesuai dengan ketentuan regulasi, dan diharapkan memahami dari kewajiban serta larangan yang tertuang dalam regulasi.

Untuk sasaran kegiatan pengawasan tahun anggaran 2023, lebih memprioritaskan kepada kios pengecer pupuk bersubsidi, yang diharapkan semua kios pengecer bisa menyalurkan pupuk subsidi tersebut tepat kepada petani atau kelompok/tani yang terdaftar dalam E-RDKK atau E-Alokasi

- b. Pelaksanaan Rapat koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida dilaksanakan sebanyak 1 kali di Provinsi Gorontalo

jumlah Komoditi Unggulan yang Dieksport, Outcome dari program adalah Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor dengan target 6 Komoditi, dan capaian 7 Komoditi yaitu molases, ikan tuna, kopra, jagung, santan beku, minyak mentah dan pelet.



Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

Realisasi capaian tidak memenuhi target 100% fisik karena terdapat item belanja honorarium narasumber dan belanja perjalanan dinas luar negeri yang tidak terealisasi. dan realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena terdapat sisa-sisa belanja yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Output program/kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Misi Dagang

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Misi Dagang untuk memperkuat potensi perdagangan kerja sama di berbagai sektor, dan membangun partnership dan jejaring bisnis dengan menghadirkan pelaku usaha dan berbagai stakeholder antar kedua provinsi, membangun kesepahaman dan tindak lanjut kerja sama di bidang perdagangan sapi serta adanya permasalahan tentang Pengiriman Sapi dari Provinsi Gorontalo ke Tarakan karena adanya persyaratan dari Balai karantina Pertanian yang mempersyaratkan karantina mandiri 14 hari.

Kegiatan Misi Dagang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2023 dan dilaksanakan di Tarakan Kalimantan Utara. dengan melibatkan 3 (tiga) pelaku usaha pedagang sapi dari Provinsi Gorontalo.

b. Pelaksanaan Pameran Dagang

Kegiatan Pameran ini sebagai ajang promosi yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempromosikan produk potensi ekspor dan produk ekspor. Produk potensi ekspor disini adalah bahan/barang hasil olahan usaha kecil menengah (UKM) dari daerah yang kualitasnya diminati dan mempunyai daya jual. Pameran kali ini mengikutsertakan 4 (empat) UKM/IKM pada Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke – 38 yang merupakan pameran tahunan berskala internasional oleh Kementerian Perdagangan. 4 (empat) UKM/IKM itu yaitu :

- PT. Mafahim Goorntalo Indonesia, Pemilik Zikran Mbuti. Produk teh daun Sirsak
- IKM Putro. Pemilik Vivi Suaib. Produk Keripik Pisang Susu
- Kaini Karawo, pemilik Otherandi Produk Kain Karawo



- UKM Depulalitata. Pemilik Rachmatia M. Aridi Produk Olahan Pangan

Faktor-faktor yang mendukung tingkat pencapaian target kinerja tersebut antara lain koordinasi lintas sektor dengan SKPD terkait baik provinsi maupun kabupaten/kota serta dukungan pemerintah daerah untuk tetap mendorong semua pihak dalam meningkatkan ekspor Gorontalo hal ini dapat dilihat dari adanya perjanjian kerja sama MOU peningkatan eksport antara Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, Bea Cukai, Pelindo dan Garuda Indonesia di tahun 2018.

Namun dibalik pencapaian target tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang perlu diantisipasi, antara lain :

- a. Pemahaman dan pengetahuan eksportir tentang prosedur, mekanisme dan standarisasi mutu barang ekspor-impor perlu terus ditingkatkan, seiring dengan dinamika kebijakan ekspor-impor baik nasional maupun negara tujuan ekspor.
- b. Produksi Jagung Gorontalo dan komoditi lainnya baik produktifitas maupun luas panen serta mutu produksi komoditi perlu ditingkatkan dalam rangka mendorong peningkatan ekspor daerah.
- c. Sarana Pelabuhan Gorontalo dan Pelabuhan Anggrek sebagai pintu gerbang ekspor perlu ditingkatkan kapasitasnya sehingga mampu melayani ekspor dan antar pulau secara cepat, efektif dan efisien dalam waktu bersamaan.
- d. Peningkatan koordinasi dengan PT. Pelindo dan Administrasi Palayaran (Adpel) Gorontalo dalam mendukung peningkatan dan percepatan arus perdagangan antar pulau dan ekspor.
- e. Ekspor sangat tergantung pada tingkat permintaan pasar luar negeri, sehingga manakala terjadi krisis seperti pada akhir 2010 hingga 2011 maka akan berpengaruh terhadap volume ekspor daerah.
- f. Perlunya media informasi yang lebih cepat, murah dan mudah diakses sehingga akan memperlancar pemasaran dan market intelegent komoditi unggulan Gorontalo.
- g. Terbatasnya jaringan kerjasama antara para pelaku usaha UKM sebagai calon eksportir di daerah.
- h. Membuka peluang bagi para UKM sebagai calon eksportir di Provinsi Gorontalo. dimana saat ini di siasati dengan menghubungi para calon eksportir yang bersedia melaksanakan ekspor untuk komoditi hasil



laut, perkebunan dll. Sehingga sangat dibutuhkan dukungan penganggaran yang maksimal untuk pencapaian target promosi komoditi unggulan Provinsi Gorontalo.

- i. Mengupayakan kerjasama dengan direktorat perdagangan luar negeri untuk bisa mempertemukan eksportir walau hanya dalam virtual untuk membuka peluang ekspor ke pasar non tradisional (Belgia, perancis, india, arab Saudi, uni soviet (dan federasi rusia), spayol, Thailand, vietnam. Kemudian juga adanya kerjasama dari Maskapai Garuda yang membuka rute Manado-Narita dan Makassar – Singapura sehingga biaya ekspor lebih hemat 30 % dari biaya sebelumnya..

Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen, Outcome dari program adalah Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen target 5 Dokumen, Capaian 5 Dokumen.

❖ **Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain sidang BPSK, honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK Penyelesaian Sengketa Konsumen dilaksanakan bila ada pengaduan konsumen dan apabila terindikasi akan merugikan konsumen misalnya ada promo penjualan, klausula baku yang akan merugikan konsumen, penjualan barang yang tidak sesuai ataupun merugikan konsumen dan lain-lain sesuai peraturan perlindungan Konsumen maka penyelesaian sengketa konsumenn di laksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan juga Oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Sasaran Pelaksanaan kegiatan Untuk melindungi Konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Anggota BPSK dan Sekretariat BPSK, yang dilaksanakan di Kota Gorontalo dengan peserta anggota dan sekretariat BPSK dari 6 Kabupaten/Kota Mengevaluasi kegiatan Bimbingan Teknis BPSK yang



dilaksanakan anggota BPSK Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan MENPERINDAG No.350/MPP/Kep/12/2001, Peraturan Menteri Perdagangan RI No 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

- c. Sosialisasi BPSK Oleh anggota BPSK di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo. Sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BPSK juga di laksanakan oleh anggota BPSK di setiap pelaksanaan pasar murah di kabupaten kota sesuai dengan lokasi pasar murah yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo

Pelaksanaan Sosialisasi Anggota BPSK dengan tujuan agar masyarakat mengetahui keberadaan BPSK serta mengetahui Tugas dan Fungsi BPSK sesuai yang diamanatkan oleh UU Perlindungan Konsumen. Jumlah Pengaduan Konsumen Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebanyak 320 Kasus pengaduan, dan yang diselesaikan 284 kasus antara lain tentang Pengaduan permasalahan pembiayaan, Pengaduan Klausula Baku, liter/timbangan, penjualan diatas harga Het, penjualan makanan/minuman ditoko-toko (diserahkan ke BPOM Kabupaten/Kota). kasus yang tidak terselesaikan bukan kewenangan BPSK Kabupaten/Kota.

- c. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kegiatan BPSK
- d. Pengaduan Konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai ketentuan yang berlaku:
- BPSK Kabupaten Pohuwato ditahun 2023 jumlah kasus yang ditangani 26, yang diselesaikan melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus kalausula baku/pembiayaan
 - BPSK Kota Gorontalo, 53 kasus yang ditangani dan penyelesaian sengketa secara mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus kalausula baku/pembiayaan
 - ~ BPSK Kabupaten Gorontalo ditahun 2023 jumlah kasus 49, yang diselesaikam melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus kalausula baku/pembiayaan
 - ~ BPSK Kabupaten Boalemo, ditahun 2023 jumlah kasus 49, yang diselesaikam melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus kalausula baku/pembiayaan



- ~ BPSK Kabupaten Bone Bolango ditahun 2023 jumlah kasus 31 yang diterima,
- ~ Kabupaten Gorontalo Utara, ditahun 2023 jumlah kasus 25 yang diterima, yang diselesaikan melalui mediasi. Jenis kasus kalausula baku/pembiayaan .
- ~ Provinsi Gorontalo, terdiri atas 10 kasus liter/timbangan (pasar tradisional/toko) dan 2 kasus penukaran kembalian uang dengan permen. 4 kasus pembelian yang harganya tidak bersesuaian antara harga. Penyelesaian kasus ini melalui pembinaan.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian target kinerja tersebut antara lain makin efektifnya koordinasi lintas instansi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan di daerah.

Namun dibalik pencapaian target tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian antara lain sarana dan prasarana pengawasan barang beredar masih sangat terbatas, seperti belum adanya kendaraan operasional khusus pengawasan barang dan belum maksimalnya kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat kabupaten/kota yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan di daerah.

❖ **Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk

Indikator kinerja adalah Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau dengan target 3 komoditi dan capaian 4 (empat) Komoditi yaitu kopi, biji kakao, kelapa sawit dan lada putih. Sesuai Keputusan Menteri Perdagangan No. 164 Tahun 1996 tentang pengawasan mutu secara wajib untuk produk ekspor tertentu.

Output kegiatan ini adalah :

- a. Jumlah komoditi yang dipantau sebanyak 7 (tujuh) yaitu jagung, rumput laut, kakao, beras, kelapa sawit, kopra, dan kopi
- b. Pengawasan mutu barang/komoditi ber-SNI di kabupaten/kota
- c. Jejaring kerja program kegiatan dengan Kabupaten / Kota



- d. Partisipasi pada Temu Pelanggan Pelatihan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional Pada tanggal 30 November 2023
- e. Koordinasi program dan kegiatan di Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI di Jakarta
- f. Rakorev dan Forum SKPD Dinas Kumperindag Provinsi dan Dinas Kumperindag Kabupaten / Kota di Jakarta

Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian

Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang, target 100 Dokumen, capaian 209 Dokumen Laporan Hasil Pengujian untuk 7 komoditi.

Output kegiatan ini adalah :

- a. Jumlah pengujian komoditi sesuai standart dengan 556 kali pengujian dan 209 Laporan Hasil Pengujian
- b. Pengambilan sampel komoditi di kabupaten/kota
- c. Pemeliharaan alat laboratorium yaitu Reinstall dan Short Training penggunaan Kromatografi Gas
- d. Penggantian Gas Clean Filter Oxygen dan Gas Clean Filter Moisture pada Kromatografi Gas
- e. Pengadaan Alat laboratorium yaitu Furnace untuk pengujian Kadar Abu
- f. Penyediaan bahan penunjang laboratorium pengujian
- g. Pengujian khusus untuk komoditi akreditasi sebagai komoditi ekspor yaitu jagung dengan menerbitkan 9 SKM
- h. Fasilitasi Informasi Kandungan Gizi untuk UKM pangan olahan 44 Produk Pangan olahan untuk 34 UKM di kab/kota se provinsi gorontalo
- i. Pengolahan limbah laboratorium bekerja sama dengan PT. Mitra Hijau Asia.
- j. Mengikuti kegiatan Uji Banding antar Laboratorium, yaitu :
 - Uji banding beras yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Jambi pada bulan Februari 2023, dengan tujuan untuk memantau, menilai dan mengevaluasi kompetensi Laboratorium dalam bidang pengujian komoditi beras hasilnya satisfactory (sangat memuaskan).



- Uji banding kakao dan kopi yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Sulsel pada tanggal 17 sd 18 juli 2023, dengan tujuan untuk memantau, menilai dan mengevaluasi kompetensi Laboratorium dalam bidang pengujian komoditi kopi dan kakao. Hasilnya satisfactory (sangat memuaskan).
- Uji banding rumput laut yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Sulsel pada tanggal 17 sd 18 Juli 2023. Hasilnya satisfactory (sangat memuaskan)
- k. Mengikuti kegiatan temu pelanggan Balai BPMB Direktorat Standalitu tanggal 7 November 2023 di Bekasi Jawa Barat
- l. Magang PMB pengujian Mutu Beras di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian pada tanggal 3 sd 4 Agustus 2023 di Karawang Jawa Barat
 - Rakorev dan Forum OPD Dinas Kumperindag Provinsi dan Dinas Kumperindag Kabupaten / Kota yang dilaksanakan di Jakarta

Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi

Ouput dari kegiatan ini adalah Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan, target 2 sertifikat dan capaian sebanyak 9 sertifikat kesesuaian mutu (SKM)

Output kegiatan ini adalah :

- a. Jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 9 SKM
- b. Sistem Manajemen Mutu melalui Kaji Ulang Manajemen, Audit Internal dan Kaji Ulang Dokumen
- c. Sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat yaitu media cetak dan televisi
- d. In House Training (IHT) SNI ISO 9001 : 2015 pada tanggal 30 Juli sd 1 Agustus 2023
- e. Partisipasi pada Bulan Mutu Nasional pada 15 November 2023 di Jakarta

Beberapa hal yang menunjang pencapaian target kinerja BPSMB ini antara lain



1. Makin efektifnya penyebaran informasi fungsi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan sosialisasi standar mutu serta pentingnya sertifikasi mutu barang kepada pelaku usaha, khususnya eksportir dan pedagang antar pulau.
2. Terakreditasinya laboratorium BPSMB pada awal 2011 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sehingga hingga saat ini laboratorium BPSMB terus mempertahankan akreditasi laboratorium sehingga bisa menerbitkan sertifikat mutu barang sebagai salah satu dokumen yang dipersyaratkan pada barang ekspor serta menjamin mutu komoditi/produk.
3. Ketersediaan Gedung Laboratorium di tahun 2021

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu segera diatasi antara lain :

- a. keterbatasan sarana penunjang peralatan laboratorium pengujian mutu (UPTD BPSMB) menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu barang pada beberapa komoditi serta
- b. Minimnya sarana dan prasarana laboratorium pengujian mutu, sehingga pelayanan kepada pelanggan/konsumen tidak maksimal. UPTD BPSMB belum sepenuhnya mampu melaksanakan layanan pengujian dan sertifikasi mutu barang pada beberapa komoditi karena belum memiliki peralatan yang memadai seperti alat analisis laboratorium berupa Spektrofotometer UV, Atomic Absorption Spectrophotometer/AAS dan High Performance Liquid Chromatography/HPLC (kromatografi cair untuk pengujian toksin pada komoditi pangan, pengujian kandungan nutrisi/vitamin produk pangan olahan) yang di tahun 2020 pengadaan alat-alat ini melalui DAK Kementerian Perdagangan RI di refocusing untuk penanganan covid-19), penyediaan meja uji (wall bench dan island bench)
- c. Sarana dan prasarana laboratorium pengujian mutu yang terbatas mengakibatkan sulitnya tenaga fungsional Penguji Mutu Barang untuk memperoleh angka kredit/poin pengujian sebagai syarat kenaikan jabatan fungsional.



- d. Keterbatasan sarana operasional yang berdampak pelayanan pengujian jarak jauh sering tidak terpenuhi dan kegiatan lainnya di UPTD BPSMB terkendala.
- e. Saat ini BPSMB Gorontalo sedang merintis pengembangan Lembaga Sertifikasi Produk untuk beras dan AMDK, serta membutuhkan peningkatan kompetensi tenaga² auditor

Sejak tahun 2020 pelaksanaan program peningkatan standarisasi mutu barang lebih diarahkan pada optimalisasi peran BPSMB dalam memfasilitasi pengujian dan sertifikasi mutu barang/produk unggulan Gorontalo, dan tidak hanya terbatas pada komoditi jagung dan rumput laut, juga telah dilakukan penambahan 2 lingkup pengujian akreditasi yakni biji kakao dan beras serta rencana perluasan ruang lingkup untuk komoditi kopi serta penambahan pelayanan pengujian lainnya

❖ **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi, dengan capaian 100 % yaitu 12 laporan pengawasan yang dilaksanakan di Kabupaten/kota.

Output kegiatan :

- a. **Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa dan Pengawasan Perdagangan, Lokasi Pengawasan** se provinsi Gorontalo yaitu terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yakni Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa dan Pengawasan Perdagangan dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN)

Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas kabupaten/Kota dan lintas sektoral untuk melakukan pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, dan pengawasan



kegiatan perdagangan baik ditingkat distributor maupun pengecer (toko-toko, pedagang-pedagang pasar tradisional, Swalayan, supermarket minimarket dan kios-kios) dengan tujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kuantitas barang beredar dan jasa serta memperkuat daya saing produk dalam negeri sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan

1. Untuk Barang :

- a. Standar
- b. Label dalam bahasa Indonesia
- c. Petunjuk Penggunaan
- d. Jaminan Layanan Purna Jual
- e. Cara Menjual
- f. Pengiklanan
- g. Kalusula Baku

2. Untuk Jasa :

- a. Standar
- b. Jaminan dan/ataugaransi yang di sepakati dan/atau di perjanjikan
- c. Kalusula Baku

3. Untuk Pengawasan Perdagangan Meliputi;

- a. Perizinan di bidang perdagangan
- b. Perdagangan Barang yang diawasi, di larang dan/atau diatur
- c. Diatribusi
- d. Pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal inpor yang terkait dengan K3L (keamanan, keselamatan, Kesehatan dan lingkungan hidup)
- e. Pemberlakuan SNI kualifikasi secara wajib
- f. Pendaftaran Gudang
- g. Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan/atau penting
- h. Perdagangan melalui sistim elektronik

Hasil Pengawasan barang Beredar dan atau/Jasa :

1. Setrika listrik merek terbaru yang sudah standar nasional tetapi masih dibutuhkan pengujian.



2. Terdapatnya Besi, celokan, kabel, kipas angin yang belum sesuai dengan Standar Nasional dan masih terdapatnya barang yang tidak memiliki label harga pada barang yang diperdagangkan.
3. Masih banyak terdapat barang-barang kadaluarsa yang bercampur dengan barang-barang yang masih layak di konsumsi, berupa Biskuit, minuman dan bahan untuk pembuatan kue terdapat pada gudang-gudang di Kabupaten Gorontalo, toko di Kabupaten Boalemo serta Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara dan penyelesaiannya di dilaporkan ke BPOM dan diselesaikan oleh Dinas Kabupaten/Kota.

Pengawasan Perdagangan antara lain :

1. Distribusi
 - a. Pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi
 - Pola Distribusi dari Produsen
 - Distributor, Agen ke Pengecer.
 - Distribusi Barang
 - b. Distribusi barang yang dilarang, diawasi, dan diatur.
 - Minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gula rafinasi, barang berbahaya.
 - c. Pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan penting.
2. Perijinan
 - Gudang-gudang (Tanda daftar Gudang, Siup, TDP, TDPUD, SIUP-MB)
3. Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
 - Pasar rakyat
 - Pusat-pusat perbelanjaan
 - Toko swalayan
 - Gudang
 - Sarana perdagangan lainnya

Hasil Pengawasan

1. Masih terdapatnya penjualan minyak kita yang diatas harga Het misalnya di pasar-pasar tradisional



2. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak mempunyai tanda daftar gudang
3. Terdapatnya minuman beralkohol yang kadarnya 4.5% masih di jual di toko-toko tidak mempunyai ijin
4. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak sesuai dengan peruntukannya
5. Distributor Minuman beralkohol yang izinnya sudah menghampiri (dalam proses penegakan Hukum oleh kepolisian)
6. Banyak sub pangkalan-pangkalan Gas LPG yang Nakal menjual Gas LPG sudah melebihi Harga HET,
7. Masih terdapatnya distributor besi yang menjual Besi Beton yang sudah mempunyai SNI namun ukuran panjang diameternya tidak sesuai dengan ukuran yang di janjikan

Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian antara lain Sarana dan prasarana pengawasan barang beredar masih sangat terbatas. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap ketentuan peraturan yang berlaku serta keterbatasan aparat pemda sebagai pengawas barang dan jasa serta pengawas perdagangan, begitupun Pengawasan Barang beredar dan/atau jasa serta Perdagangan harus lebih dioptimalkan dalam hal pembinaan sebab masih banyak pelaku pelaku usaha yang belum memahami peraturan-peraturan berlaku

Persentase Peningkatan Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen Asn, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Perencanaan, Penatausahaan Keuangan Dan Pengawasan,

Pada program ini terdiri atas 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 dokumen). Di tahun 2023 telah dihasilkan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 7 Dokumen perencanaan yaitu Dokumen renja, renstra, RAK, RKA, KAK, RAB, SIRUP

Output dari kegiatan ini adalah :



- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bidang Koperasi UMKM Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo di Kabupaten Boalemo
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pendampingan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Koordinasi Pelaksanaan Program di kab/Kota, Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Bimtek Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (6 laporan)

Di tahun 2023 telah dihasilkan 8 Dokumen Monitoring dan Evaluasi yaitu Dokumen Rencana Aksi, LKPJ, LPPD, laporan evaluasi renja per triwulan, E-Monev, Lakip, Laporan Tahunan (LAPKIN APBN), laporan tahunan APBD masing-masing bidang

Output dari kegiatan ini adalah :

- Forum OPD Bidang Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Tingkat Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 23-24 Februari 2023 yang diikuti oleh aparat Pembina Dinas Kumperindag Kabupaten/kota
- Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka koordinasi pelaksanaan program/kegiatan, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan, Pendampingan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Koordinasi Pelaksanaan Program di kab/Kota, Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penyusunan Program.

Beberapa faktor pendorong tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain :

- a. Membaiknya kualitas koordinasi pelaksanaan program kegiatan antar bidang yang bersumber dari APBD maupun APBN dan DIF serta koordinasi program dan kegiatan lintas pusat, provinsi dan kabupaten/kota baik sehingga tercipta sinergi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program/kegiatan.
- b. Kualitas koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah terus ditingkatkan sehingga diharapkan aada peningkatan terhadap alokasi anggaran Kementerian yang tersebar di 6 kabupaten/kota dan provinsi. serta DAK Non Fisik dari Kementerian Koperasi dan



UKM RI yakni di khsususkan untuk Peningaktan SDM Koperasi dan UMKM.

Namun demikian, masih ditemui beberapa permasalahan yang perlu dibahas dan solusi terbaik, antara lain :

- a. Keterbatasan anggaran menyebabkan capaian indicator program dan kegiatan tidak maksimal serta pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan terbatas.
- b. Sesuai tupoksi Dinas Kumperindag menjalankan 3 kewenangan yakni Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Ditingkat pusat, ketiga kewenangan ini dilaksanakan oleh 3 Kementerian. Dengan perbandingan ini terlihat beban dan volume pekerjaan yang melekat pada Dinas Kumperindag sangat besar dan memerlukan sumberdaya yang besar pula untuk melaksanakannya. Beberapa dukungan sumberdaya yang diperlukan dalam rangka penguatan peran SKPD antara lain SDM, sarana prasarana kantor, ketersediaan kendaraan dinas operasional, dukungan pendanaan APBD dan APBN.

Pada tahun 2023 program peningkatan kualitas perencanaan bidang Kumperindag diarahkan untuk mengefektifkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan upaya relevansi program dan kegiatan baik melalui forum perencanaan, Forum SKPD Tingkat Kabupaten/Kota, koordinasi ke pusat, antar provinsi dan lintas kabupaten/kota, lintas instansi, dan lintas pemangku kepentingan, sehingga kinerja hasil program dan output kegiatan bidang.

❖ **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. *Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*

Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (87 orang/bulan).

- b. *Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*

Indikator Output Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 laporan).

Beberapa faktor yang dapat menunjang pencapaian target kinerja tersebut antara lain



1. Membaiknya tata kelola keuangan SKPD yang berdampak pelayanan keuangan yang semakin cepat, efektif dan efisien.
2. Meningkatnya jumlah SDM keuangan yang mengikuti bimtek dan diklat bagi pengelola keuangan SKPD, yang ditandai dengan laporan keuangan tepat waktu dan pelayanan administrasi keuangan secara cepat dan akurat.
3. Semakin intensifnya pembinaan dan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo telah mendorong terciptanya penyelenggaraan keuangan yang baik dan akuntabel.

Penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2023 tidak lepas dari program dan kegiatan serta alokasi anggaran, yang pada prinsipnya tetap difokuskan pada pencapaian indikator kinerja utama sasaran pembangunan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan.

Sebagai bagian dari dinamika pembangunan daerah, maka perkembangan tuntutan dan kebutuhan daerah tersebut perlu direspon secara cepat, tepat dan terukur, agar dampak yang ditimbulkannya bisa memberikan *multiplier effect* terhadap hajat hidup orang banyak dan perekonomian daerah.

❖ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator output yaitu jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan sebanyak 87 orang

Output kegiatan ini adalah keikutsertaan pada diklat peningkatan SDM Aparatur (12 orang), E-PPID (4 orang), Diklat Srikandi (4 orang), Aset (1 orang), SIPD (5 orang), Study komparasi Makassar (5 orang), study komparasi manado (7 orang), Tim Digital Talent Scholarship (2 orang), Praktek Reformasi Birokrasi (3 orang).

❖ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator output yaitu Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan (30 paket)

Output kegiatan ini adalah penyediaan sarana prasarana perkantoran (belanja modal), perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, suku cadang alat angkutan dan bahan bakar/pelumas.



❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 laporan).

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Membaiknya kinerja Sekretariat SKPD dalam mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pelayanan jasa administrasi perkantoran yang professional.
2. Meningkatnya pembinaan terhadap PNS yang mendorong peningkatan disiplin dan budaya kerja kearah yang lebih baik.
3. Pemanfaatan aplikasi SIREKA BMD dan E-BMD untuk pelaporan asset secara berkala tentang rencana kebutuhan barang inventaris, pemeliharaan barang inventaris kantor, pelaporan perubahan kondisi asset peralatan dan mesin, dll

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan antara lain :

- a. Gedung kantor yang memerlukan perbaikan/renovasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kumperindag.
- b. Belum adanya jabatan fungsional yang sesuai untuk bidang pengembangan dan pemberdayaan kopperasi dan usaha kecil (KUKM)
- c. Jumlah SDM yang terbatas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana kantor.

Pada tahun 2023 program pelayanan administrasi perkantoran diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi secara cepat, efisien dan terukur, sehingga bisa menciptakan kepastian waktu dan kejelasan prosedur pelayanan dalam rangka pelayanan publik. Sedangkan untuk program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan SKPD.

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja hasil program dan output kegiatan tahun 2023 dan progress 2024 diuraikan dalam *Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo* sebagai berikut.



Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD Tahun 2023
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100 %		100	%	100	%	100%	100	%	100 %	100
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	10 Dokumen		10	Dokumen	10	Dokumen	100%	10	Dokumen	10 Dokumen	100
2.17.01.1.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen		4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	4 Dokumen	100
2.17.01.1.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Laporan		6	Dokumen	6	Dokumen	100%	6	Dokumen	6 Dokumen	100
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan	87 Orang		87	Orang	87	Orang	100%	87	Orang	87 Orang	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target		
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		tunjangannya												
2.17.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/ Bulan		87	Orang	87	Orang	100%	87	Orang	87 Orang	100	
2.17.01.1.02.05	- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1 Laporan	100	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	87 Orang		124	Orang	124	Orang	100%	0	Orang	0 Orang	0	
2.17.01.1.05.09	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	87 Orang		124	Orang	124	Orang	100%	0	Orang	0 Orang	0	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	30 paket		30	Paket	30	Paket	100%	30	Paket	30 Paket	100	
2.17.01.1.06.02	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Paket		30	Paket	30	Paket	100%	30	Paket	30 Paket	100	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan		1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1 Laporan	100
2.17.01.1.08.03	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan		1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1 Laporan	100
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	20 Koperasi		20	Koperasi	22	Koperasi	110%	20	Koperasi	20 Koperasi	100
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	20 Dokumen		20	Dokumen	22	Dokumen	110%	20	Dokumen	20 Dokumen	100
2.17.03.1.01.02	- Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan tersedianya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	20 Unit Usaha		20	Dokumen	22	Dokumen	110%	20	Dokumen	20 Dokumen	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390 Orang		390	Orang	400	Orang	103%	390	Orang	390 Orang	100
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	390 Orang		225	Orang	400	Orang	178%	390	Orang	390 Orang	100
2.17.05.1.01.01	- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	390 Orang		225	Orang	400	Orang	178%	390	Orang	390 Orang	100
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	25 Unit Usaha		15	Unit Usaha	60	Unit Usaha	400%	20	Unit Usaha	20 Unit Usaha	100
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	25 Unit Usaha		15	Unit Usaha	60	Unit Usaha	400%	20	Unit Usaha	20 Unit Usaha	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.06.1.01.02	- Peningkatan produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	25 Unit Usaha		15	Unit Usaha	60	Unit Usaha	400%	20	Unit Usaha	20 Unit Usaha	100
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	160 Unit Usaha		100	Unit Usaha	50	Unit Usaha	50%	140	Unit Usaha	140 Unit Usaha	100
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	300 Unit Usaha		200	Unit Usaha	228	Unit Usaha	114%	250	Unit Usaha	250 Unit Usaha	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.07.1.01.01	- Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	Jumlah unit usaha UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	300 Unit Usaha		228	Unit Usaha	228	Unit Usaha	100%	318	Unit Usaha	318 Unit Usaha	100
2.17.07.1.01.02	- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UMKM dan kewirausahaan	358 Orang		278	Orang	278	Orang	100%	250	Orang	250 Orang	100
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	50 Unit Usaha		30	Unit Usaha	50	Unit Usaha	167%	40	Unit Usaha	40 Unit Usaha	100
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah	50 Unit Usaha		30	Unit Usaha	50	Unit Usaha	167%	40	Unit Usaha	40 Unit Usaha	100
2.17.08.1.01.01	- Produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan,	50 Unit Usaha		9273	Unit Usaha	9273	Unit Usaha	100%	14749	Unit Usaha	14749 Unit Usaha	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target		
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi												
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang difasilitasi dan diawasi	2 Dokumen		2	Dok	8	Dok	400%	2	Dok	2 Dok	100	
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	10 Dokumen		8	Dok	65	Dok	813%	9	Dok	9 Dok	100	
3.30.02.1.04.01	- Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	10 Dokumen		8	Dok	65	Dok	813%	9	Dok	9 Dok	100	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting	28 Laporan		28	Laporan	28	Laporan	100%	16	Laporan	16 Laporan	100	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.04.1.02	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	16 Laporan		16	Laporan	16	Laporan	100%	16	Laporan	16 Laporan	100
3.30.04.1.02.01	- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota	12 Laporan		12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12 Laporan	100
3.30.04.1.02.02	- Operasi pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	4 Laporan		4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	4 Laporan	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	12 Laporan		12	Laporan	12	Laporan	100%	0	Laporan	0 Laporan	0
3.30.04.1.03.03	- Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	12 Laporan		12	Laporan	12	Laporan	100%	0	Laporan	0 Laporan	0
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	8 Komoditi		6	Komoditi	7	Komoditi	117%	0	Komoditi	0 Komoditi	0
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/	8 Pelaku Usaha		6	Pelaku Usaha	7	Pelaku Usaha	117%	0	Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target		
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Kota dalam Provinsi												
3.30.05.1.01.03	- Misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	8 Pelaku Usaha		6	Pelaku Usaha	7	Pelaku Usaha	117%	0	Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	9 Dokumen		5	Dokumen	5	Dokumen	100%	7	Dokumen	7 Dokumen	100	
3.30.06.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kab/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	12 Kasus		10	Kasus	238	Kasus	2380%	11	Kasus	11 Kasus	100	
3.30.06.1.01.01	- Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen	Jumlah badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang aktif	6 BPSK		6	BPSK	6	BPSK	100%	6	BPSK	6 BPSK	100	
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	204 Dokumen		102	Dokumen	557	Dokumen	546%	153	Dokumen	153 Dokumen	100	
3.30.06.1.02.01	- Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial Yang Dipantau	3 Komoditi		3	Komoditi	4	Komoditi	133%	3	Komoditi	3 Komoditi	100	
3.30.06.1.02.02	- Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah dokumen hasil pengujian mutu barang	200 Dokumen		100	Dokumen	209	Dokumen	209%	150	Dokumen	150 Dokumen	100	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.30.06.1.02.03	- Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah sertifikasi produk yang diterbitkan	4 Sertifikat		2	Sertifikat	9	Sertifikat	450%	2	Sertifikat	2 Sertifikat	100
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	50 Pelaku Usaha		30	Pelaku Usaha	100	Pelaku Usaha	333%	40	Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	100
3.30.06.1.03.01	- Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen	Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	12 Laporan		12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12 Laporan	100
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36 Dokumen		36	Dokumen	36	Dokumen	100%	36	Dokumen	36 Dokumen	100
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	36 Dokumen		36	Dokumen	36	Dokumen	100%	36	Dokumen	36 Dokumen	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.02.1.01.03	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen		12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	12 Dokumen	100
3.31.02.1.01.05	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen		12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	12 Dokumen	100
3.31.02.1.01.06	- Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	12 Dokumen		12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	12 Dokumen	100
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	1 Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	0	Dokumen	0 Dokumen	0



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	1 Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	0	Dokumen	0 Dokumen	0
3.31.03.1.01.01	- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi : 1)Industri besar; 2)Industri kecil dan industri menengah yang lokasinya lintas	1 Dokumen		1	Dokumen	1	Dokumen	100%	0	Dokumen	0 Dokumen	0



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target			
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %		
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		kab/kota, 3)Kawasan Industri, dan perizinan perluasan kawasan Industri yang merupakan PMDN yang berlokasi lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi													
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah informasi industri & fasilitas pengolahan data industri	12 Dokumen		12	Dokumen	12	Dokumen	100%	0	Dokumen	0 Dokumen	0		
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12 Dokumen		12	Dokumen	12	Dokumen	100%	0	Dokumen	0 Dokumen	0		
3.31.04.1.01.01	- Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil fasilitas pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain lingkup Provinsi melalui Sistem	12 Dokumen		12	Dokumen	12	Dokumen	100%	0	Dokumen	0 Dokumen	0		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target		
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Informasi Industri Nasional (SIINas)												
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan layanan jasa administrasi, penyediaan sarana prasarana dan SDM Aparatur		95,97%										
		Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan		100%										
a	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Adminsitiasi Perkantoran Dinas Kumperindag		100%										
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana SKPD		86,27%										
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang di latih		26 ASN										
d	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen Perencanaan dan Koordinasi lintas		8 Dokumen										



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja				Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target				
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)						Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %		
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Daerah	sektor/SKPD/Pusat													
		Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan SKPD		7 Dokumen											
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan		1 Dokumen											
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	- Jumlah Koperasi Aktif		985 Koperasi Aktif											
		- Jumlah Koperasi berkualitas		20 Koperasi Berkualitas											
		- Jumlah Koperasi berprestasi		20 Koperasi Berprestasi											
a	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi serta masyarakat yang ditingkatkan pemahamannya berkaitan dengan aturan/regulasi kelembagaan		390 pengurus, pengawas, pengelola dan masyarakat yang dilatih											
		Jumlah Revitalisasi Koperasi		7 Koperasi											



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target			
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %		
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	jumlah dokumen laporan hasil pengawasan		12 dokumen											
		Jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk & dilatih		1 Tim satgas (provinsi)											
		Jumlah koperasi berprestasi & koperasi percontohan		20 koperasi											
		Jumlah pemeriksaan KSP/USP		12 Koperasi											
a	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	jumlah dokumen laporan hasil pengawasan		12 dokumen											
		Jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk & dilatih		1 Tim satgas (provinsi)											
		Jumlah koperasi berprestasi & koperasi percontohan		20 koperasi											
		Jumlah pemeriksaan KSP/USP		12 Koperasi											
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses		4867 KUKM											



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja				Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target			
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)						Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	KOPERASI	permodalan												
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi kredit perbankan		6 kali										
a	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan		4867 KUKM										
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi kredit perbankan		6 kali										
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang dibina/naik kelas		75 UKM										
a	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang ditingkatkan pemahaman mengenai manajemen, pengelolaan, produktivitas dan pemasaran		67 UKM										
				0 UKM Yang Dimagangkan										
6	PROGRAM PENGEMBANGAN	Jumlah UKM yang di bina/Naik Kelas		75 UKM										



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target			
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)					Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %		
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
	UMKM												
a	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang dibina		75 UKM									
		Jumlah produk UKM/IKM yang dipromosikan/ dipasarkan di dalam & luar daerah		35 produk UKM/IKM									
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Perdagangan antar Pulau		4033 Kali									
a	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar		33 kali Operasi Pasar									
b	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi		10									



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %		
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Sertifikasi Mutu Barang		12 Sertifikat									
a	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/atau jasa sesuai parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha yang diawasi		120 Pelaku Usaha									
b	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen		91 Kasus									
c	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian Standar Mutu Barang		1051 Kali									
		Pelaku Usaha UKM yang Menerapkan Standar Mutu Barang		51 Pelaku Usaha									
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Ekspor		11 Komoditi									



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
a	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Misi dagang ekspor dan antar pulau		1 Misi Dagang									
		Jumlah Komoditi Produk Ekspor yang dipromosikan		14 Komoditi									
		Jumlah UKM yang memahami prosedur ekspor		0 Calon Eksportir									
9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah IKM yang di bina		212 IKM									
a	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang Bersertifikat dan terampil tentang pengolahan pangan		68 IKM yang mendapat Bimtek/Bantuan Pengolahan Pangan									
		Jumlah Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka yang dibina Penguasaan Teknologi		97 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina									



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan (RENJA OPD tahun n-1) 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target		
					Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)							Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja OPD Tahun 2023		Realisasi Renja OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4	5	6		7		8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah IKM di Bidang Logam, Mesin dan elektronik yang dibina Penguasaan Teknologi		47 IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina										
		Jumlah Industri Agro Terpadu		0 Industri Agro Terpadu										
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Data Informasi IKM		1 Sistem Informasi IKM										
a	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Data Informasi IKM		1 Sistem Informasi IKM										



Adapun evaluasi capaian Renstra tahun 2023 yang merupakan merupakan tahun pertama periode Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2023-2026 dengan mengacu pada RKPD tahun 2023, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo di tahun 2023 telah melaksanakan 13 program, 21 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Secara umum dari 13 program yang dilaksanakan di tahun 2023 realisasi 12 program telah mencapai target yang ditetapkan dan 1 (satu) program yaitu program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) capainnya dibawah 100% . adapun rinciannya sebagai berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Tahun 2023		Realisasi OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6		7		8 (7/6)
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100	%	100	%	100%
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	20	Koperasi	22	Koperasi	110%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang	400	Orang	103%
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	15	Unit Usaha	60	Unit Usaha	400%
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	100	Unit Usaha	50	Unit Usaha	50%
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	30	Unit Usaha	50	Unit Usaha	167%
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang difasilitasi dan diawasi	2	Dok	8	Dok	400%
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTIHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting	28	Laporan	28	Laporan	100%
3.30.05	PROGRAM	Jumlah Komoditi	6	Komoditi	7	Komoditi	117%



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD Tahun 2023		Realisasi OPD Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6		7		8 (7/6)
	PENGEMBANGAN EKSPOR	Unggulan yang Diekspor					
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100%
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36	Dokumen	36	Dokumen	100%
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri	12	Dokumen	12	Dokumen	100%

Di tahun 2023 sebanyak 278 UKM telah diintervensi dengan program kegiatan antara lain bedah produk (25 ukm), mentoring UMKM berbasis syariah (25) pelaku usaha maupun stimulan pengembangan produk bagi 228 UKM dan UKM ini sebagian megikuti kurasi produk tersebut untuk menuju UKM yang berdaya saing. Di tahun 2023 telah dilaksanakan proses seleksi kurasi produk oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan Bank Indonesia dan yang lolos kurasi produk ini sebanyak 50 UKM. Sehingga target indikator jumlah UKM yang berdaya saing capaian 50 UKM dari target 100 UKM belum tercapai (50%).

Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Dari pencapaian program Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2023 berdasarkan target program yang sudah direncanakan pada Renstra Dinas Kumperindag 2023-2026 terdapat faktor keberhasilan dan faktor kegagalan yang mempengaruhi pencapaian target adalah:



a. Faktor Keberhasilan

1. Faktor Eksternal

- Menjalinkan Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders (Pemerintah Daerah Setempat, masyarakat calon penerima stimulan bantuan dan lembaga/institusi terkait lainnya) sehingga diharapkan permasalahan, kendala dan hambatan dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku,
- Kemudahan pengurusan Izin berusaha dan akses permodalan KUKM

2. Faktor Internal

- Kesiapan rencana pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran misalnya untuk stimulan bantuan melalui tahapan verifikasi, validasi,
- SDM di Dinas Kumperindag yang berusaha untuk bekerja optimal untuk melaksanakan program kegiatan sesuai target yang ditetapkan

b. Faktor Kegagalan Pada pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kumperindag Tahun 2023 terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian, yaitu:

- Dukungan anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan tidak optimal sesuai target yang diharapkan
- Proses verifikasi yang berulang dilaksanakan di lapangan yang menyerap anggaran karena calon penerima bantuan tidak sesuai persyaratan pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan.
- Rendahnya kualitas SDM para pelaku usaha dalam mengembangkan usaha UKM/IKM

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah:

- Penganggaran program/kegiatan yang lebih optimal sehingga pelaksanaan program/kegiatan lebih maksimal sesuai target yang ditetapkan.
- Diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta swasta dalam berbagai kesempatan termasuk forum Musrenbang untuk mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan dan kewenangan terhadap kegiatan-kegiatan prioritas.



- melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan program yang dilaksanakan di masyarakat serta untuk perencanaan program ditahun berikutnya.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan peningkatan kemampuan SDM dan daya saing para pelaku usaha dan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kumperindag

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA berdasarkan indikator yang sudah ditentukan terhadap IKK sesuai dengan peraturan yang berlaku

Jenis indikator yang dikaji, sesuai tugas dan fungsi Dinas Kumeprindag, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan, dan dampak yang ditimbulkan akibat kinerja pelayanan tersebut. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas dan fungsi. Selanjutnya tolak ukur dan Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan RPD dan RKPD. Penentuan indikator serta capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan yang ditetapkan. Penetapan tolak ukur dan Indikator Kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Gorontalo yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator Kinerja Utama ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya yang berkewajiban menjamin konsistensi antara RPD dengan Rencana Strategis



Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo serta wajib melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Adapun Indikator Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kumperindag
Provinsi Gorontalo

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	Target 2023
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kumperindag	Nilai SAKIP	Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja+ Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	74,5
2	Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)	Jumlah Koperasi Berkualitas	Koperasi Sehat Tahun-n	20
		Jumlah UKM yang berdaya saing	UKM naik kelas Tahun-n	60
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	$\frac{Jumlah\ Industri\ (n) - Jumlah\ Industri\ (n1)}{Jumlah\ Industri\ (n - 1)} \times$	0,78%
	Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor	Nilai Ekspor Tahun-n	\$14.102.573

1. Jumlah Koperasi Berkualitas

Jumlah koperasi berkualitas adalah jumlah koperasi sehat di tahun n (2023) . adapun target jumlah koperasi berkualitas tahun 2023 sebesar 20 UKM dengan realisasi sebesar 22 UKM. Sehingga capaian jumlah koperasi berkualitas sebesar 110%.

Capaian indikator koperasi berkualitas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu aspek tata kelola, aspek kinerja keuangan, aspek profil risiko dan aspek permodalan. Dimana untuk koperasi berkualitas berdasarkan pemeringkatan. Aspek penilaian yaitu kelembagaan, usaha, keuangan, manfaat koperasi terhadap anggota, manfaat koperasi terhadap masyarakat. Dengan hasil pemeringkatan sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas dan tidak berkualitas



2. Jumlah UKM yang Berdaya Saing
- capaian jumlah UKM yang Berdaya saing 83,34% dengan realisasi 50 UKM dari target 60 UKM. Indikator UKM yang berdaya saing antara lain adanya peningkatan produktifitas, peningkatan pangsa pasar sertapertumbuhan output. UKM ini telah megikuti kurasi produk yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan Bank Indonesia
3. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah, dengan realisasi sebesar 17,97% dari target 0,78%
- Indikator kinerja urusan industri “Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah ” Tahun 2023 diperoleh dari :
- $$\frac{(\text{Jumlah industri tahun } n - \text{jumlah industri thn } n-1)}{(\text{Jumlah Industri Tahun } n-1)} \times 100\%$$
- Dimana :
- Jumlah industri tahun 2023 = 13.210 IKM
Jumlah industri tahun 2022 = 11.197 IKM
* jumlah IKM 2023 berdasarkan data SIIDIG
4. Jumlah Nilai Ekspor
- Di tahun 2023 capaian sebesar 269%. Dari target \$14.102.57 dengan capaian \$37.959.205. Jumlah Nilai Ekspor Tahun 2023 berjumlah \$37.959.205 data ini diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Asal dan Bea Cukai Gorontalo. Komoditi Export 2023 yaitu Ikan tuna, molases, santan beku, jagung, wood pelet, briket, minyak mentah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Analisis kinerja pelayanan SKPD dilakukan terhadap capaian indikator kinerja sesuai target Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2023 – 2026 yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada *Tabel T-C.30*. Dari tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kumperindag terhadap target Renstra 2023-2026 dimana diharapkan capaian target dapat terpenuhi dan proyeksi pada tahun 2024 sampai 2026 dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.



Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

No	INDIKATOR KINERJA	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET KINERJA SASARAN				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP			74,5	74,68	74,88	75,05	78,41		74,88	75,05	
2	Jumlah Koperasi Berkualitas			20	20	20	20	22		20	20	
	Jumlah UKM yang berdaya saing			60	70	80	90	50		80	90	
3	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah			0,78%	0,84%	0,90%	0,95%	17,97		0,90%	0,95%	
4	Jumlah Nilai Ekspor			\$14.102.573	\$14.807.701	\$15.548.086	\$16.325.490	\$37.959.205		\$15.548.086	\$16.325.490	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Pergub Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo. Dalam Pergub tersebut disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Kumperindag sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Kumperindag memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
- f. pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi dan sinergi program kegiatan dengan perangkat daerah kabupaten kota dengan kementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, antara lain :

- a. Dinas Kumperindag kabupaten/kota dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan di kabupaten kota seperti pengawasan koperasi, pembinaan IKM/UKM, pelaksanaan operasi pasar, pengawasan barang beredar dl.
- b. Kemenkum HAM yaitu untuk penerbitan izin pendirian koperasi/penerbitan HAKI bagi pelaku usaha UKM/IKM
- c. Dinas Pariwisata dalam bentuk sinergi promosi produk UKM/IKM



- d. Bank Indonesia dalam bentuk sinergi promosi produk dan pemberdayaan serta pengembangan UKM/IKM,
- e. Bea cukai untuk Koordinasi dan pengawasan export import
- f. MUI untuk penrbitan sertifikat halal bagi pelaku usaha UKM/IKM
- g. Badan Amil Zakat Nasional dalam bentuk perjanjian kerjasama tentang penyaluran zakat maal program ekonomi produktif dan program kemanusiaan
- h. Komite Akreditasi Nasiona (KAN) untuk akreditasi Laboratorium UPTD BPSMB,
- i. LS Pro tterkait penrbitan sertifikat produk

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi yang menjadi isu penting baik internal maupun eksternal, antara lain :

Isu-isu Internal :

1. Kualitas SDM aparatur. Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, karena ketersediaan SDM yang memiliki skil, keahlian dan pengetahuan terhadap pekerjaan akan sangat menentukan kualitas kebijakan dan pelayanan publik OPD. Kondisi SDM Dinas Kumperindag relatif cukup tersedia, berpengalaman, ahli dibidangnya dan memiliki tingkat responsibilitas yang tinggi terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberikan akan tetapi Jabatan fungsional yang ada belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang digeluti dimana belum tersedianya fungsional UMKM dan pejabat fungsional masih bekerja rangkap antara tugas struktural dan fungsional. Bimtek peningkatan SDM bagi aparur dan pejabat fungsional belum tersedia.
2. Iklim dan budaya kerja yang terbangun dilingkungan OPD. Ini merupakan salah satu faktor pendorong (positif) atau justru sebaliknya menjadi penghambat (negatif) dalam pencapaian kinerja OPD. Sejauh ini iklim dan budaya kerja dilingkungan Dinas Kumperindag cukup kondusif dalam mendukung pencapaian kinerja OPD, meskipun belum sepenuhnya optimal.
3. Sarana dan prasarana pendukung. Kedudukan sarana dan prasarana hampir sama pentingnya dengan ketersediaan SDM yang memadai. Kondisi sarana dan prasarana penunjang di lingkungan Dinas Kumperindag masih sangat terbatas. Ruang kerja dan gedung yang belum representative, ketersediaan peralatan laboratorium di UPTD BPSMB serta kendaraan operasional UPTD BPSMB
4. Koordinasi internal lintas Sub Dinas (Subdin) dalam OPD. Koordinasi merupakan sarana komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi. Koordinasi yang terbangun di lingkungan Dinas Kumperindag telah optimal, terutama dalam hal sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Nuansa



ego sektoral tidak sampai pada level kritis yang bisa menghambat pencapaian kinerja OPD.

5. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan monev program lintas pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Secara umum koordinasi yang terbangun relatif semakin baik, meskipun belum optimal.

Isu-isu Eksternal :

Isu-isu strategis di bidang Koperasi dan UMKM adalah Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi, Peningkatan Akses Pasar, Akses Permodalan, Peningkatan Kualitas SDM KUKM, Peningkatan daya saing UKM.

Perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM adalah:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi.
- b. Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi
- c. Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.

Tantangan dalam pengembangan Koperasi UKM adalah :

- a. Sumber daya manusia (SDM), terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional; Masih terbatasnya SDM Pembina Koperasi dalam hal pengawasan dan pembinaan, sehingga perlunya dukungan peningkatan SDM Bagi Pembina Koperasi.
- b. Kelembagaan, dari sisi kelembagaan belum berfungsinya perangkat organisasi koperasi antara sesama pengurus, pengawasan dan anggota koperasi terkait dengan tugas dan wewenang masing_masing.
- c. Proses pembentukan koperasi yang sudah tidak mewajibkan rekomendasi dari dinas teknis berakibat tumbuh suburnya koperasi yang tidak sehat dan kesulitan dalam pembinaan dan pengawasan serta kesulitan pengurusan izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait, sehingga menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang



- koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis bisnis yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- d. Pembiayaan, perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
 - e. Produksi dan pemasaran, pada umumnya sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok, dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

Salah satu faktor keberhasilan suatu UMKM adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem manajemen pembagian tugas yang baik. Namun secara umum, kualitas pendidikan pengelola UMKM masih rendah menjadikan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha, misalnya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan maupun stimulan bantuan. UMKM di Indonesia memiliki karakteristik informal yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Mayoritas UMKM belum mampu mengoprasionalkan sistem komputer, website, internet dan berbagai platform digital yang dapat mendukung akses pemasaran UMKM serta belum menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau dengan kata lain masih sedikit UMKM yang naik kelas sehingga menjadi salah satu tantangan terbesar saat ini.

Isu strategis di bidang perindustrian adalah Peningkatan kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan, Peningkatan produktivitas dan pemasaran produk IKM baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional, Pengembangan sentra dan kluster industri di daerah dan Penetapan Rencana Kawasan Industri Terpadu

Isu strategis di bidang perdagangan adalah

- a. Pelaksanaan operasi pasar
- b. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen,
- c. Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Pengawas Perdagangan,
- d. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku usaha ekspor
- e. Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Standar



- f. Belum baiknya system distribusi barang dan jasa, merupakan dampak dari jaringan distribusi yang belum tertata dengan baik (sarana pasar dan infrastruktur transportasi) . Hal ini ditandai dengan masih panjangnya rantai distribusi barang, tingginya disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan.
- g. Rendahnya akses pasar luar negeri merupakan dampak dari belum berkembangnya sistem informasi pasar termasuk rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pasar luar negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas produk, promosi dan pemasaran (termasuk *market intelegent*), kapasitas usaha, dan permodalan sehingga belum mampu mengakselerasi peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah.
- h. Belum transparannya ketersediaan pasokan di tingkat distributor dan agen,
- i. Terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan, silo, pendingin) di tingkat produksi.
- j. Kebijakan perdagangan antar pulau untuk mendukung peningkatan transaksi antar pulau yang belum sinergi baik antar provinsi maupun antar kawasan strategis di Sulawesi.
- k. Masih lemahnya pengamanan pasar dalam negeri, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.
- l. Keterbatasan anggaran berakibat tidak maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan di OPD sehingga target kinerja tidak optimal

Isu strategis di bidang Pelayanan SKPD adalah

- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik SKPD yang ditandai dengan keterbatasan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas serta belum tersedianya jabatan fungsional UMKM.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan monev program baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kelembagaan SKPD karena keterbatasan anggaran.

Beberapa isu-isu penting yang menjadi tantangan dan dihadapi dalam penyelenggaraan tugas fungsi OPD tersebut diatas merupakan tantangan sekaligus peluang yang menjadi *starting point* sekaligus dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun berikutnya.

Dalam penerapan kebijakan pembangunan, perencanaan pembangunan menengah Provinsi Gorontalo disusun dalam bentuk dokumen Rencana



Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 – 2026 yang telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023 – 2026 dengan visi sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 yaitu; **“Gorontalo Maju dan Mandiri”** Visi tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu : Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai provinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan system hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas. Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan Tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Gorontalo 2007-2025 tersebut, maka ditempuh 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, adalah mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. 2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal, adalah pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan, dan pemerataan akses Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spiritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, social budaya, adat olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas. 3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah, adalah pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan public, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, right sizing OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan public, serta peningkatan penyebarluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada



public. RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menetapkan Visi; “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan menjabarkannya pencapaiannya ke dalam Misi berikut: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Terkait dengan visi misi tersebut diatas, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan diproyeksikan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian misi pertama yaitu Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal antara lain melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian yang menjadi tujuan jangka menengah OPD.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan adalah : 1) Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri. 2) Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya. 3) Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan. 4) Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat. 5) Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha. 6) Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 yang sebelumnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025. RKPD tahun 2025 menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah



Daerah Tahun 2025 serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) tahun 2025.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rencana Kerja Pembangunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Kumperindag berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Diskumperindag periode 2023-2026 yang telah disusun dan direview atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Kumperindag merupakan kebutuhan dan menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan.

Untuk tahun 2025, rencana pembangunan pemerintah pusat mengambil tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan penguatan pada 7 Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Adapun rencana pembangunan pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil tema “Peningkatan Ekonomi & Sumber daya Manusia didukung oleh kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintah yang baik”, dengan 4 (Empat) Unsur Tema sebagai penjabarannya, yakni:

- Peningkatan Ekonomi;
- Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- Tata Kelola Pemerintahannya

Berdasarkan kebijakan utama pembangunan Gorontalo dalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun berjalan dan isu strategis pembangunan daerah, maka ditetapkan tema dan unsur tema pembangunan untuk tahun 2025 adalah:. Unsur-unsur tema RKPD



Tahun 2023 “Transformasi Sosial Ekonomi Inklusif dan Hilirisasi Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang didukung Tata Kelola Pemerintahan”.

Adapun unsur tema RKPD tahun 2025 adalah, sebagai berikut :

1. Transformasi Sosial (Penanganan Kemiskinan dan Stunting) : a. Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan (SMA, SMK dan Pendidikan Khusus) b. Meningkatnya derajat kesehatan c. Peningkatan kualitas anak, perempuan, pemuda dan Kelompok Rentan d. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama e. Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat f. Meningkatnya budaya literasi masyarakat
2. Transformasi Ekonomi dan Hilirisasi Sumber Daya Alam Berkelanjutan : a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan b. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian c. Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup e. Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim
3. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis : a. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan ekonomi Inklusif dan Pelayanan Dasar.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Stabilitas Keamanan Daerah : a. Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah b. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Sebagai aktualisasi terhadap tema pembangunan daerah Tahun 2025, maka ditetapkanlah program dan kegiatan prioritas OPD dalam RKPD 2025 Rancangan Awal.

Hasil perbandingan antara program dan kegiatan dalam RKPD 2025 Rancangan Awal dengan analisis kebutuhan yang tertuang dalam Renja Dinas Kumperindag Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program kegiatan pada renja 2025 adalah program kegiatan dalam upaya pencapaian target yang terdapat pada Renstra Tahun 2023-2026 dan telah menyesuaikan dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Kepmen 050 tahun 2020 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, dengan indikator pada RKPD dan Renstra OPD.
2. Pada RKPD 2025 Rancangan Awal pada Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan, belum mencantumkan anggaran sehingga pagu indikatif RKPD Rancangan awal pada tabel T-C.31. tidak dapat



- dicantumkan, dan analisis kebutuhan mengacu pada pagu indikatif Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2025.
3. Pada RKPD 2025 rancangan awal memuat 13 program dan di Renja terdiri dari 11 Program
 4. Terdapat perbedaan antara Indikator kinerja program serta target pada RKPD 2025 rancangan awal dengan Renja Dinas Kumperindag 2025 yang merujuk pada Renstra Dinas Kumperindag 2023-2026.
 5. Adapun pagu indikatif rancangan RKPD tahun 2025 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 berjumlah Rp. 16.473.284.366,- (sesuai surat dari Sekretariat Daerah Nomor: 050/Bappeda-P2EPD/942/IV/2024 tanggal 16 April 2024
 6. Hasil analisis kebutuhan menyesuaikan dengan pagu indikatif yang diberikan berjumlah Rp. 16.473.284.366,- belum termasuk DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi UKM. Anggaran terdiri dari belanja wajib mengikat Rp. 13.161.239.762,- Honorarium BPSK Rp. 1.836.000.000,- dan belanja program kegiatan Rp. 1.476.044.604,-
Anggaran kegiatan Rp. 1.476.044.604,- sangat minim untuk membiayai dan untuk mencapai indikator kinerja pelaksanaan program kegiatan di 4 Bidang, 1 Sekretariat dan 1 UPTD BPSMB yang terdiri dari 1 program, 18 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan. Anggaran Rp. 1.476.044.604,- untuk sementara akan mengakomodir biaya rutin lainnya di sekretariat dan belanja modal untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana OPD sebagai penunjang kegiatan. Kebutuhan anggaran lainnya akan disampaikan pada saat penajaman Renja dengan Bappeda Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan pertimbangan tambahan anggaran untuk menunjang pencapaian indikator kinerja pada Dinas Kumperindag yang lebih optimal dengan mengajukan usulan program kegiatan prioritas lainnya.



Tabel T.C. 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					-	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		Kan dg ssh yang so ada			16.473.284.116	
I.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					14.637.284.116	
I.1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					14.637.284.116	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase peningkatan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur serta perencanaan monev dan pelaporan.	100	%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100	%	14.637.284.116	
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Koperasi Berprestasi	100	%		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Koperasi Sehat	20	Koperasi	-	



No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
	PEMERIKSAAN KOPERASI						KOPERASI						
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Koperasi Aktif & Jumlah Koperasi Berprestasi	390	Orang		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Provinsi Gorontalo	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang	-	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Koperasi & UMKM yang mengakses permodalan	35	Unit Usaha		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Koperasi Aktif	25	Unit Usaha	-	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Provinsi Gorontalo	Jumlah UKM yang dibina/naik kelas	300	unit usaha 240 orang		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Provinsi Gorontalo	Jumlah UKM yang berdaya saing	160	Unit Usaha	-	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Provinsi Gorontalo	Jumlah UKM yang dibina	50	unit usaha 140 orang		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Provinsi Gorontalo	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	50	Unit Usaha	-	
II.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					-	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					1.836.000.000	
II.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.836.000.000	
7	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN	Provinsi Gorontalo		23	Dokumen		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan	1	Dokumen	-	



No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
	PERUSAHAAN						PERUSAHAAN		Diawasi				
8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Provinsi Gorontalo	Jumlah Perdagangan Antar Pulau	20	Laporan		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28	Laporan	-	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Provinsi Gorontalo	Jumlah Export	8	Komoditi		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Provinsi Gorontalo	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	8	Komoditi	-	
10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Perdagangan Antar Pulau	100	%		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	9	Dokumen	1.836.000.000	
III.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					-	
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Provinsi Gorontalo	Jumlah IKM yang dibina	8	Dokumen		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36	Dokumen	-	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			1									
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI		Data Informasi IKM	13									



No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
	NASIONAL												
	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)					-	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)					-	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					-	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase peningkatan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur serta perencanaan monev dan pelaporan.	100	%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100	%	-	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					-	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					-	



No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					-	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Perdagangan Antar Pulau	100	%		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	9	Dokumen	-	
	Total					-	Total					16.473.284.116	

- Pagu belum termasuk DAK Non Fisik P2KUKM
- Analisis kebutuhan menyesuaikan dengan pagu indikatif yang diberikan



Adapun hasil perbandingan antara program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir RKPD ahun 2025 dengan analisis kebutuhan yang tertuang dalam Renja Rancangan Akhir Dinas Kumperindag Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program kegiatan pada renja 2025 adalah program kegiatan dalam upaya pencapaian target yang terdapat pada Renstra Tahun 2023-2026 dan telah menyesuaikan dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Kepmen 050 tahun 2020 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, dengan indikator pada RKPD dan Renstra OPD.
2. Program dalam Renja Rancangan akhir 2025 berjumlah 11 Program, 18 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan sama seperti yang tercantum pada RKPD Provinsi gorontalo Tahun 2025. Dimana pagu indikatif pada Ranwal RKPD Rp. 16.473.284.366,- kemudian hasil penyesuaian pagu indikatif berdasarkan hasil pembahasan Renja PD Rp. 7.000.000.000,- sehingga penyesuaian pagu rancangan akhir RKPD Tahun 2025 sejumlah Rp. 23.473.284.366,- (berdasarkan surat Sekretariat Daerah Nomor 050/Bappeda-P2EPD/1249/V/2024 tanggal 17 Mei 2024) dan penyesuaian pagu final rancangan akhir RKPD Tahun 2025 berjumlah Rp. 22.473.284.366,- (berdasarkan surat Sekretariat Daerah Nomor 050/Bappeda-P2EPD/1638/VI/2024 tanggal 24 Juni 2023).
3. Total anggaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo pada RKPD 2025 sebesar Rp. 22.473.284.366- (dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) terdiri dari anggaran pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 21.473.284.366- (dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan telah terinput pada SIPD-RI pada tahapan RKPD.
4. Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 22.473.284.366,- sudah termasuk Gaji Tunjangan. Tidak termasuk DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi UKM. Di Tahun 2025 berdasarkan Surat dari Kemenkop UKM RI No. B-391/SM/PW.05.02/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 Provinsi Gorontalo belum memperoleh alokasi anggaran DAK Non Fisik PK2UKM
5. Khusus anggaran Program Kegiatan 2025 sebesar Rp. 11.831.192.600,- (sesebelas milyar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah). Dimana anggaran ini telah melalui proses review Bappeda dan penyesuaian pagu final rancangan akhir RKPD Tahun 2025 sebesar Rp. 22.473.284.366,-



6. Jumlah program/kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tidak ada penambahan jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Sehingga untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kumperindag Tahun 2025, maka dilakukan review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 yang tertuang dalam tabel 2.12 tentang rencana program dan kegiatan prioritas Provinsi Gorontalo Tahun 2025



Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Dinas Kumperindag provinsi Gorontalo

No	Rancangan Akhir RKPD						Rancangan Akhir RENJA					
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif
	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					21.473.284.366	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					21.473.284.366
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					17.186.259.366	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					17.186.259.366
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					17.186.259.366	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					17.186.259.366
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100	%	15.103.496.366	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100	%	15.103.496.366
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Koperasi Sehat	20	Koperasi	257.664.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Koperasi Sehat	20	Koperasi	257.664.000
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Provinsi Gorontalo	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang	241.559.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Provinsi Gorontalo	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang	241.559.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Koperasi Aktif	25	Unit Usaha	500.777.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Koperasi Aktif	25	Unit Usaha	500.777.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Provinsi Gorontalo	Jumlah UKM yang berdaya saing	160	Unit Usaha	339.772.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Provinsi Gorontalo	Jumlah UKM yang berdaya saing	160	Unit Usaha	339.772.000



No	Rancangan Akhir RKPD						Rancangan Akhir RENJA					
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Provinsi Gorontalo	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	50	Unit Usaha	742.991.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Provinsi Gorontalo	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	50	Unit Usaha	742.991.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					4.287.025.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					4.287.025.000
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					3.287.025.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					3.287.025.000
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	1	Dokumen	23.550.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	1	Dokumen	23.550.000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28	Laporan	1.024.429.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28	Laporan	1.024.429.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Provinsi Gorontalo	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	8	Komoditi	228.052.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Provinsi Gorontalo	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	8	Komoditi	228.052.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	9	Dokumen	2.010.994.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	9	Dokumen	2.010.994.000
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.000.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.000.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36	Dokumen	1.000.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36	Dokumen	1.000.000.000
	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)					1.000.000.000	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)					1.000.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					578.906.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					578.906.000



No	Rancangan Akhir RKPD						Rancangan Akhir RENJA					
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					578.906.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					578.906.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100	%	578.906.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100	%	578.906.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					421.094.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					421.094.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					421.094.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					421.094.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	9	Dokumen	421.094.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	9	Dokumen	421.094.000
	Total					22.473.284.366	Total					22.473.284.366



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka perumusan program dan kegiatan Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 mengaakomodir melalui hasil rapat koordinasi bidang koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan, pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat, Musrenbang RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025,

Berbagai usulan stakeholder yang disampaikan dalam forum perencanaan Musrembang Tingkat Provinsi Gorontalo, serta usulan Masyarakat melalui reses DPR tersebut diolah dan disesuaikan nomenklaturnya dan ketersediaan anggaran untuk kemudian dituangkan kedalam usulan program dan kegiatan Renja 2025.



Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
I. 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
I.1.1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
1.1.1.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
1.1.1.1.1	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	
I.1.2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
I.1.2.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
I.1.2.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	390 Orang	Kegiatan ini diusulkan untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM pengelola Koperasi
I.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
I.1.3.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
I.1.3.1.1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 Unit Usaha	
I.1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
I.1.4.1	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				



NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
I.1.4.1.1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	250 Unit Usaha	
I.1.4.1.2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	318 Orang	Kegiatan ini diusulkan untuk pelatihan peningkatan kapasitas pelaku UMKM di Kabupaten Boalemo.
I.1.5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
I.1.5.1	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				
I.1.5.1.1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 Unit Usaha	Kegiatan ini diusulkan untuk memberikan stimulan modal bagi pelaku UMKM di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan hasil pokok-pokok pikiran DPR
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
I.1.6	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
I.1.6.1	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				
I.1.6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	9 Dokumen	
I.1.7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
I.1.7.1	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				



NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
I.1.7.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	
I.1.7.1.2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Laporan	Kegiatan ini diusulkan untuk stabilisasi harga dan pemenuhan ketersediaan bahan pokok pangan dan hasil musrembang pokok-pokok pikiran DPR
I.1.7.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				
I.1.7.2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	
I.1.8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
I.1.8.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				
I.1.8.1.1	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha	
I.1.9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
I.1.9.1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				
I.1.9.1.1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Kabupaten/ Kota	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	6 BPSK	
I.1.9.2	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				
I.1.9.2.1	Verifikasi Mutu Produk	Kabupaten/ Kota	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3 Komoditi	



NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
I.1.9.2.2	Pengembangan Layanan Pengujian	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	100 Dokumen	
I.1.9.2.3	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan Barang	2 Sertifikat	
I.1.9.3	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				
I.1.9.3.1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
I.1.10	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
I.1.10.1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				
I.1.10.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen	Kegiatan ini diusulkan untuk memberikan bantuan berupa bahan, peralatan dan rumah produksi bagi pelaku IKM Pangan dan pokok-pokok pikiran DPR
I.1.10.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	Kegiatan ini diusulkan untuk memberikan bantuan berupa bahan, peralatan dan rumah produksi bagi pelaku IKM Kerajinan dan Perbengkelan dan pokok-pokok pikiran DPR
I.1.10.1.3	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	12 Dokumen	
I.1.11	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
I.1.11.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				



NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi : 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Dokumen	
I.1.12	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
I.1.12.1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				
I.1.12.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten/ Kota	Data Informasi IKM	1 Sistem Informasi IKM	Pemenuhan data IKM



BAB III

TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Kumperindag melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Diskumperindag diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;



6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dirumuskan berdasarkan kebijakan penyusunan rencana pembangunan daerah bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. RPD 2023-2026 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025. Periode akhir dalam tahapan RPJPD sangat penting dalam mewujudkan visi jangka panjang Gorontalo 2007-2025, yaitu **Gorontalo Maju dan Mandiri**. Perumusan Rencana Pembangunan Daerah dalam RPD 2023-2026 mengacu pada upaya pencapaian visi misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 dimana terdapat misi yang menjadi penjabaran pencapaian visi RPJPD serta fokus-fokus pembangunan utama yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan ekonomi Gorontalo yang handal
2. Mewujudkan sumberdaya manusia Gorontalo yang handal
3. Mewujudkan pemerintahan daerah Gorontalo yang amanah

Masalah dan tantangan secara keseluruhan yang akan dihadapi Tahun 2025 masih cukup berat dan harus ditangani secara cermat agar memberikan hasil pembangunan yang optimal. Adapun permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi
2. Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi
3. Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.
4. Rendahnya kualitas SDM dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan, peningkatan produktivitas dan pemasaran produk IKM baik pada pasar local, regional nasional dan internasional.
5. Masih perlunya pengembangan sentra dan kluster industri di daerah dan penetapan rencana Kawasan industri terpadu.
6. Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
7. Tingginya Biaya Logistik
8. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait BPSK
9. Kurangnya intensitas pengawasan kegiatan perdagangan dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
10. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur ekspor



11. Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium BPSMB
12. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur Dinas Kumperindag
13. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD
14. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan lintas pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Tantangan kedepan dalam upaya mengembangkan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan :

- a. Sumber daya manusia (SDM), terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional
- b. Kelembagaan. Belum berfungsinya perangkat organisasi koperasi antara sesama pengurus, pengawas dan anggota koperasi terkait dengan tugas dan wewenang masing-masing.
- c. Pembiayaan, perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
- d. Produksi dan pemasaran, pada umumnya system produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok, dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menjaga stabilitas harga, serta langkah-langkah perluasan/pemerataan untuk mengurangi kesenjangan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Salah satu prakarsa baru sebagai pengungkit (*leverage*) bagi percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi nasional adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. MP3EI merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025.

Kebijakan nasional yang terkait dengan pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-growth*), memperluas lapangan kerja (*pro-job*), menanggulangi kemiskinan (*pro-poor*) serta merespon persoalan-persoalan perubahan iklim (*pro-environment*). Aktualisasi dari kebijakan nasional tersebut antara lain :



1. Sasaran pembangunan industri nasional adalah peningkatan pertumbuhan industri pengolahan non migas. Untuk itu kebijakan industri untuk tujuan jangka pendek diarahkan pada pengamanan pasar domestik dari produk impor serta berbagai upaya harmonisasi tarif. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang diarahkan pada revitalisasi industri, penumbuhan klaster industri berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia terampil, dan industri untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri yang difokuskan pada: (1) Revitalisasi industri, khususnya industri pupuk, industri gula, dan revitalisasi berbagai rumpun (*cluster*) industri prioritas sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional; dan (2) Penumbuhan rumpun industri berbasis minyak sawit (*oleochemical*) serta rumpun industri berbasis kondensat minyak dan gas bumi.
2. Sasaran perdagangan internasional adalah meningkatnya angka pertumbuhan ekspor, dalam rangka meningkatkan akses pasar, Indonesia melakukan *multitrack strategy*, yaitu strategi diplomasi di fora multilateral, regional, dan bilateral, Melalui *multitrack strategy* ini. Indonesia telah berhasil memperkuat perannya di berbagai fora internasional, baik di forum WTO melalui G-20, G-33, dan NAMA 11, di forum ASEAN, ASEAN – Mitra dan Sub Regional ASEAN serta forum Bilateral.
3. Sasaran perdagangan dalam negeri adalah memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional (*locally integrated. internationally connected*). Penguatan konektivitas nasional ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*) logistik.
4. Sasaran pembangunan koperasi dan UKM Provinsi Gorontalo 2023-2026 adalah :
 - a. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat Mandiri dan Maju
 - b. Mewujudkan UMKM Naik kelas yang Berdaulat dan Mampu bersaing di pasar domestik dan global
 - c. Menyediakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang efektif
 - d. Menyelenggarakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM melalui program/kegiatan yang efektif, efisien, bermanfaat dan berkelanjutan
 - e. Menyelenggarakan pengendalian pengawasan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM
 - f. Mewujudkan profesionalisme aparatur sipil negara
 - g. Mewujudkan sistem data dan informasi pengembangan koperasi dan UMKM yang terintegrasi
 - h. Mewujudkan tata kelola pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang baik



Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut diatas. maka kebijakan pembangunan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Gorontalo diarahkan pada :

1. Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan pendampingan koperasi
2. Peningkatan Kapasitas Usaha, akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha.
3. Pengawasan, Pemeriksaan, Pengendalian serta Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
4. Fasiltasi pembiayaan dan penguatan modal UKM, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM serta Kelembagaan UKM
5. Digitalisasi promosi, perluasan pemasaran dan pengembangan UKM
6. Peningkatan produktifitas UKM (produksi, pemasaran, kelembagaan, kerjasama dan kemitraan)
7. Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri (RPIP/RPIK) Tahun 2021-2041
8. Fasilitasi Perolehan Izin dan pengawasan Usaha Industri
9. Penyediaan Data Informasi Industri Berbasis Digital
10. Pengawasan dan Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok/Barang penting
11. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan/ tertib niaga/ barang beredar dan jasa serta rekomendasi ekspso
12. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan/tertib niaga/barang beredar dan jasa serta promosi penggunaan produk dalam negeri
13. Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor dan Optimalisasi Task Force Ekspor

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program/kegiatan dan pagu indikasi. Dalam pelaksanaannya, Renstra SKPD Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 akan menjadi pedoman bagi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan OPD Kabupaten/Kota terkait dalam merumuskan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan OPD.

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 :

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 :



Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kumperindag
Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian	1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)	Persentase peningkatan kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah	Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi UKM	Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan pendampingan koperasi
					Peningkatan Kapasitas Usaha, akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha
					Pengawasan, Pemeriksaan, Pengendalian serta Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
					Fasilitasi pembiayaan dan penguatan modal UKM, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM serta Kelembagaan UKM
					Digitalisasi promosi, perluasan pemasaran dan pengembangan UKM (Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia)
					Peningkatan produktifitas UKM (produksi, pemasaran, kelembagaan, kerjasama dan kemitraan)
	2. Nilai Ekspor	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industri	Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri (RPIP/RPIK) Tahun 2021-2041
					Fasilitasi Perolehan Izin dan pengawasan Usaha Industri
					Penyediaan Data Informasi Industri Berbasis Digital
					Pengawasan dan Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok/Barang penting
				Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar	Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan/ tertib



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Kebijakan
					niaga/ barang beredar dan jasa serta rekomendasi ekspor Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan/tertib niaga/barang beredar dan jasa serta promosi penggunaan produk dalam negeri
				Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor	Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor dan Optimalisasi Task Force Ekspor
				Pengembangan usaha dan mutu pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan	Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kumperindag	Nilai SAKIP	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan penatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD
					Transformasi digital dalam penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
					Meningkatkan Sarana, Prasarana, SDM dan Administrasi Perkantoran
					Meningkatkan Tata Kelola Data Sektoral dan keuangan

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Tahun 2023–2026 dan Rencana Pembangunan Daerah 2023–2026. Nomenklatur program pada tahun 2025 mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.



Sebagai aktualisasi dari Renstra 2023-2026 dan RKPD 2023 maka program dan kegiatan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Indikator kinerja hasil program dan output kegiatan secara langsung mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.
2. Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam misi RPJPD 2007-2025. meliputi :
 - a. Mewujudkan ketahanan ekonomi Gorontalo yang handal;
 - b. Mewujudkan sumberdaya manusia Gorontalo yang handal; dan
 - c. Mewujudkan pemerintahan daerah Gorontalo yang amanah
3. Program dan kegiatan Dinas Kumperindag Tahun 2025 merujuk pada RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025, dengan tetap mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026 yang disusun bersamaan dengan RPD, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025
4. Rumusan program dan kegiatan Dinas Kumperindag Tahun 2025 memiliki relevansi pencapaian dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dan responsif Gender. Dimana kebijakan pembangunan RPD tahun 2023-2026 dalam mendukung program pembangunan responsif gender dengan kebijakan utama yaitu peningkatan sumber daya manusia dengan isu strategis masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. program/kegiatan Dinas Kumperindag diharapkan dapat mendukung program pembangunan responsif gender dengan target :
 - a. Upaya penurunan angka kemiskinan
 - b. Menciptakan kesempatan kerja dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda;
 - c. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan khususnya di bidang Koperasi, UKM/IKM
5. Program dan kegiatan Dinas Kumperindag merupakan bagian integral dari kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengoptimalkan



pemanfaatan potensi ekonomi daerah. yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perdagangan, industri pengolahan, koperasi dan UMKM sebagai sektor riil penggerak ekonomi daerah.

6. Sasaran Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan yakni meningkatnya kapasitas koperasi usaha kecil menengah, meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah, Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, daya saing perekonomian, pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting, pengendalian inflasi serta meningkatnya nilai ekspor,

Dalam menunjang hal tersebut didukung oleh program/kegiatan Diskumperindag.

Berikut diuraikan perbandingan program, kegiatan dan anggaran APBD T.A. 2024 dan Renja rancangan akhir OPD Tahun 2025.

Tabel 3.2. Perbandingan Jumlah Program Kegiatan dan Anggaran

URAIAN	JUMLAH			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
APBD T.A. 2024 (Tidak Termasuk DAK)	11	19	27	29.716.135.532
APBD Perubahan TA. 2024 (Tidak Termasuk DAK)	11	19	27	48.925.057.312
Renja 2025 (belum Termasuk DAK)	11	19	27	22.473.284.366

Tabel 3.3. Perbandingan Program. Kegiatan dan Anggaran RKPD dan Renja 2025

URAIAN	JUMLAH			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
RKPD 2025	11	19	27	22.473.284.366
RENJA 2025	11	19	27	22.473.284.366

Berdasarkan masukan dan pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Program dan Kegiatan Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR 1PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	16,00
	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				21.473.284.366,00				35.706.567.217,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.186.259.366,00				26.552.445.670,00
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				17.186.259.366,00				26.552.445.670,00
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan		100 %	15.103.496.366,00			100 %	17.411.074.870,00
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		10 Dokumen	690.226.400,00			10 Dokumen	1.089.500.000,00
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	381.369.400,00	DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	1.089.500.000,00
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	308.857.000,00	DANA ALOKASI UMUM		6 Laporan	0,00
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya		87 Orang/ Bulan	10.642.091.766,00			87	10.921.574.870,00



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR 1PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	16,00
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87 Orang/ Bulan	10.542.189.566,00	DANA ALOKASI UMUM		87 Orang/ Bulan	10.721.574.870,00
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	99.902.200,00	DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	200.000.000,00
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan		87 Orang	396.892.000,00			87 Orang	-
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Orang	396.892.000,00	DANA ALOKASI UMUM		87 Orang	0,00
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan		30 Paket	936.416.800,00			30 paket	3.250.000.000,00
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Paket	936.416.800,00	DANA ALOKASI UMUM		30 Paket	3.250.000.000,00
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Laporan	2.437.869.400,00			1 Laporan	2.150.000.000,00
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.437.869.400,00	DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	2.150.000.000,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat		20 Koperasi	257.664.000,00			20 Koperasi	437.090.800,00



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR 1PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	16,00
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi		20 Dokumen	257.664.000,00			20 Dokumen	437.090.800,00
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit Usaha	257.664.000,00	DANA ALOKASI UMUM		20 Unit Usaha	437.090.800,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya		390 Orang	241.559.000,00			390 Orang	2.114.280.000,00
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		390 Orang	241.559.000,00			390 Orang	2.114.280.000,00
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390 Orang	241.559.000,00	DANA ALOKASI UMUM		390 Orang	2.114.280.000,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif		25 Unit Usaha	500.777.000,00			30 Unit Usaha	650.000.000,00
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		25 Unit Usaha	500.777.000,00			30 Unit Usaha	650.000.000,00



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR 1PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	16,00
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit Usaha	500.777.000,00	DANA ALOKASI UMUM		30 Unit Usaha	650.000.000,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Jumlah UKM yang berdaya saing</i>		160 Unit Usaha	339.772.000,00			180 Unit Usaha	4.390.000.000,00
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya</i>		300 Unit Usaha	339.772.000,00			350 Unit Usaha	4.390.000.000,00
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Unit Usaha	297.548.000,00	DANA ALOKASI UMUM		350 Unit Usaha	2.050.000.000,00
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358 Orang	42.224.000,00	DANA ALOKASI UMUM		398 Orang	2.340.000.000,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<i>Jumlah UKM yang bertransformasi usaha</i>		50 Unit Usaha	742.991.000,00			60 Unit Usaha	1.550.000.000,00



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR 1PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	16,00
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah		50 Unit Usaha	742.991.000,00			60 Unit Usaha	1.550.000.000,00
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit Usaha	742.991.000,00	DANA ALOKASI UMUM		60 Unit Usaha	1.550.000.000,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.287.025.000,00				9.154.121.547,00
3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.287.025.000,00				6.795.000.000,00
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi		1 Dokumen	23.550.000,00			2 Dokumen	290.000.000,00
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		10 Dokumen	23.550.000,00			11 Dokumen	290.000.000,00
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	23.550.000,00	DANA ALOKASI UMUM		11 Dokumen	290.000.000,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		28 Laporan	1.024.429.000,00			28 Laporan	2.960.000.000,00



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR 1PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	16,00
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		16 Laporan	960.023.000,00			16 Laporan	2.610.000.000,00
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	44.258.000,00	DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	260.000.000,00
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	915.765.000,00	DANA ALOKASI UMUM		4 Laporan	2.350.000.000,00
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		12 Laporan	64.406.000,00			12 Laporan	350.000.000,00



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR 1PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	16,00
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	64.406.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	350.000.000,00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor		8 Komoditi	228.052.000,00			9 Komoditi	950.000.000,00
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		8 Pelaku Usaha	228.052.000,00			9 Pelaku Usaha	950.000.000,00
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Pelaku Usaha	228.052.000,00	DANA ALOKASI UMUM		9 Pelaku Usaha	950.000.000,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen		9 Dokumen	2.010.994.000,00			11 Dokumen	2.595.000.000,00
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen		12 Kasus	1.920.518.000,00			13 Kasus	2.220.000.000,00
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 BPSK	1.920.518.000,00	DANA ALOKASI UMUM		6 BPSK	2.220.000.000,00



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR 1PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	16,00
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi</i>		50 Pelaku Usaha	90.476.000,00			60 Pelaku Usaha	375.000.000,00
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	90.476.000,00	DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	375.000.000,00
3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.000.000.000,00				2.359.121.547,00
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<i>Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri</i>		36 Dokumen	1.000.000.000,00			36 Dokumen	2.359.121.547,00
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>		36 Dokumen	1.000.000.000,00			36 Dokumen	2.359.121.547,00
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	351.396.000,00	DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	852.934.407,00
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	349.884.000,00	DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	1.106.187.140,00
3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	298.720.000,00	DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	400.000.000,00



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR 1PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	16,00
	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)				1.000.000.000,00				1.783.981.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				578.906.000,00				138.481.000,00
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				578.906.000,00				138.481.000,00
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan</i>		100 %	578.906.000,00			100 %	138.481.000,00
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		1 Laporan	578.906.000,00			1 Laporan	138.481.000,00
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	578.906.000,00	DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	138.481.000,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				421.094.000,00				1.645.500.000,00
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				421.094.000,00				1.645.500.000,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen</i>		9 Dokumen	421.094.000,00			11 Dokumen	1.645.500.000,00



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR 1PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	16,00
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk		204 Dokumen	421.094.000,00			255 Dokumen	1.645.500.000,00
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 laporan	259.258.000,00	DANA ALOKASI UMUM		3 Komoditi	955.000.000,00
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Produk	95.299.000,00	DANA ALOKASI UMUM		250 Dokumen	190.500.000,00
3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/ person/ sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Sertifikat	66.537.000,00	DANA ALOKASI UMUM		5 Sertifikat	500.000.000,00
J U M L A H					22.473.284.366,00				37.490.548.217,00

- Total Anggaran ini belum termasuk DAK TA. 2025



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2025

Program Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kumperindag. Rencana program prioritas, target beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026, selanjutnya dijabarkan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dalam upaya pencapaian target RPD 2023-2026.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan, Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo.



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada RKPD Provinsi Gorontalo 2025 serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026. Kedua dokumen acuan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026. Dimana RPD 2023-2026 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 - 2025. Periode akhir dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu **Gorontalo Maju dan Mandiri**.

Selanjutnya diuraikan kedalam tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dan dioperasionalkan melalui program dan kegiatan tahunan untuk selang waktu 2023 - 2026.

Dengan memperhatikan uraian pada bab-bab sebelumnya, dan mempertimbangkan situasi terkini beserta peluang dan tantangan kedepan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo akan semakin berat. Karena di satu sisi, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan dan dibenahi. Sedangkan disisi lain, ketersediaan sumberdaya yang dimiliki Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sangat terbatas, baik SDM, sarana prasarana dan pendanaan.

Menghadapi situasi tersebut. maka perlu dikembangkan langkah-langkah strategis guna mengatasi berbagai permasalahan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, yang juga sekaligus bisa menutupi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga roda pembangunan tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program, kegiatan dan anggaran SKPD dengan Kementerian/Lembaga, OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga dengan sinergi tersebut akan tercipta efisiensi sumberdaya namun tetap memiliki daya dorong yang kuat terhadap peningkatan kinerja sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan di daerah.
2. Mendorong partisipasi dan peran aktif sektor swasta dan BUMN dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang disesuaikan dengan lingkup aktifitas dengan proporsi yang berimbang, sehingga partisipasi tersebut disamping meringankan tugas dan tanggungjawab opd, juga akan meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku usaha dan masyarakat.



3. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan instansi vertikal terkait, perbankan, asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga donor, dan organisasi lainnya dalam rangka pemberdayaan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan di daerah.
4. Penyempurnaan organisasi, revitalisasi program dan kegiatan serta indikasi anggaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo harus senantiasa diselaraskan dengan dinamika terkini dan proyeksi perkembangan pembangunan selang waktu 2023-2026
5. Ketersediaan anggaran dalam upaya pencapaian target kinerja dan pemulihan ekonomi
6. Ketersediaan Data UKM/IKM sangat dibutuhkan untuk membackup kegiatan yang akan di usulkan dan menjadi prioritas daerah

Semoga Dokumen Renja ini bisa menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta sarana sinkronisasi program pusat, provinsi, kabupaten/kota sekaligus menjadi alat ukur pencapaian kinerja Tahun 2025 dan RPD Tahun 2023 – 2026.

Gorontalo, 29 Juli 2024

KEPALA DINAS



RISION SUNGE

NIP. 19690924198902 1 001